

**PENGARUH KESADARAN POLITIK TERHADAP PARTISIPASI POLITIK
PADA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG BAKUNG UDIK
KABUPATEN TULANG BAWANG
(Skripsi)**

Oleh:

**Wilya Apriyani
NPM. 1953032009**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PENGARUH KESADARAN POLITIK TERHADAP PARTISIPASI POLITIK PADA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG BAKUNG UDIK KABUPATEN TULANG BAWANG

Oleh:

Willya Apriyani

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi politik di Kampung Bakung Udik, Kabupaten Tulang Bawang. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, melibatkan 93 responden. Data dianalisis menggunakan uji regresi linier sederhana dengan bantuan SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran politik responden terbagi menjadi tiga indikator, yaitu output, input, dan penerimaan informasi politik dan merasakan kebebasan dalam memberikan opini sebanyak 45,1% responden menunjukkan kesadaran politik yang kuat pada indikator output, seperti ketertarikan pada perkembangan politik dan keikutsertaan dalam organisasi masyarakat. Indikator input, 46,2% responden memiliki kesadaran politik yang baik, termasuk pengetahuan tentang kebijakan pemerintah dan pandangan bahwa pemerintah memengaruhi kehidupan mereka. Indikator penerimaan informasi politik dan merasakan kebebasan dalam memberikan opini menunjukkan bahwa sebanyak 69,8% dikategorikan berpengaruh, menunjukkan bahwa mereka mendapatkan informasi dengan baik dan memiliki kebebasan dalam menyerahkan opini mereka. Analisis regresi menunjukkan bahwa kesadaran politik memberikan pengaruh signifikan terhadap partisipasi politik, dengan koefisien determinasi (Rsquare) sebesar 44,6%. Ini berarti 44,6% variasi dalam partisipasi politik dapat dijelaskan oleh tingkat kesadaran politik, sementara 55,4% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Secara keseluruhan, partisipasi politik masyarakat Kampung Bakung Udik sudah baik, ditandai dengan persentase partisipasi yang cukup tinggi dibandingkan dengan mereka yang kurang berpartisipasi. Kesimpulannya, kesadaran politik berperan penting dalam meningkatkan partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa.

Kata kunci: *Politik, Partisipasi, Pendidikan, Kepala Desa, Masyarakat.*

ABSTRACT

POLITICAL AWARENESS INFLUENCE TOWARDS POLITICAL PARTICIPATION OF REGIONAL HEAD ELECTIONS IN BAKUNG UDIK VILLAGE, TULANG BAWANG REGENCY

By:

Wilya Apriyani

The aim of this research is to analyze the influence of political awareness on political participation in Bakung Udik Village, Tulang Bawang Regency. The method that used here is descriptive with a quantitative approach, involving 93 respondents. Data was analyzed using a simple linear regression test with the help of SPSS version 25. The results of the research show that respondents political awareness is divided into three indicators, namely output, input, and receipt of political information and freedom in giving opinions. 45.1% of respondents showed strong political awareness in output indicators, such as interest in political developments and participation in community organization. Input indicators, 46.2% of respondents have good political awareness, including knowledge of government policies and they understand that the government influences their lives. Indicators receiving political information and feeling the freedom to give opinions show that 69.8% are categorized as influential, indicating that they are well informed and have the freedom to give their opinions. Regression analysis shows that political awareness has a significant influence on political participation, with a coefficient of determination (Rsquare) is 44.6%. This means that 44.6% of the variation in political participation can be explained by the level of political awareness, while the remaining 55.4% is affected by other factors. Overall, the political participation of the people in Bakung Udik Village is already good, it looks from a fairly high percentage of the people participation compared to those who did not participate. The conclusion is, political awareness has an important influence for increasing political participation in village head elections.

Keywords: *Political, Participation, Education, Regional Head Election, Community.*

**PENGARUH KESADARAN POLITIK TERHADAP PARTISIPASI
POLITIK PADA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG BAKUNG UDIK
KABUPATEN TULANG BAWANG**

Oleh:

Wilya Apriyani

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

SARJANA PENDIDIKAN

Pada

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Program Studi PPKn



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS LAMPUNG

2024

Judul Skripsi

**: PENGARUH KESADARAN POLITIK
TERHADAP PARTISIPASI POLITIK PADA
PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG BAKUNG UDIK
KABUPATEN TULANG BAWANG**

Nama Mahasiswa

: Willya Apriyani

NPM

: 1953032009

Program Studi

: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan

: Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Fakultas

: Keguruan dan Ilmu Pendidikan



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Muhammad Mona Adha, M.Pd.
NIP 19791117 200501 1 002

Edi Siswanto, S.Pd., M.Pd.
NIK 231601840309101

2. Mengetahui

Ketua Jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial

Ketua Program Studi
Pendidikan Pkn

Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd.
NIP 19741108 200501 1 003

Dr. Yunisca Nuralisa, S.Pd., M.Pd.
NIP 19870602 200812 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Dr. Muhammad Mona Adha, S.Pd., M.Pd.



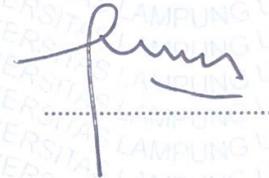
Sekretaris

: Edi Siswanto, S.Pd., M.Pd.



**Penguji
Bukan
Pembimbing**

: Drs. Berchah Pitoewas, M.H.



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Prof. Dr. Sunyono, M.Si.
NIP 19651230 199111 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 02 Agustus 2024

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, adalah:

Nama : Willya Apriyani
NPM : 1953032009
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat : Jalan Mahkota, RT/RW 002/002 Kampung Bakung Udik,
Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bandarlampung, 19 Agustus 2024



Willya Apriyani
NPM. 1953032009

RIWAYAT HIDUP



Penulis mempunyai nama lengkap Willya Apriyani. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 06 April 2001. Merupakan anak keempat dari empat bersaudara, dan merupakan buah hati dari pasangan Bapak Izwendi dan Ibu Muani.

Pendidikan formal yang pernah penulis tempuh dan selesaikan mulai dari TK 02 YAPINDO Tulang Bawang yang diselesaikan pada tahun 2007, dilanjut dengan pendidikan SDN 02 YAPINDO Tulang Bawang lulus pada tahun 2013, SMP Al-Kautsar Bandar Lampung lulus pada tahun 2016 dan SMA Al-Kautsar Bandar Lampung lulus pada tahun 2019. Penulis melanjutkan pendidikan selanjutnya dan tercatat sebagai Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Jurusan Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung pada tahun 2019 melalui jalur Mandiri.

Penulis selama menjadi mahasiswa pernah mengikuti organisasi tingkat program studi yaitu Forum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (FORDIKA) 2019-2021, kemudian berkontribusi sebagai Sekretaris Divisi Sosial FORDIKA periode 2022/2023. Penulis juga pernah mengikuti organisasi Koperasi Mahasiswa (KOPMA) Universitas Lampung 2020-2022. Penulis juga pernah mengikuti organisasi tingkat Universitas yaitu Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Lampung periode 2020/2021.

Penulis melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode I Januari 2022 sebagai Wakil Koordinator Desa di Bakung Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung dan penulis melaksanakan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) di SMP Negeri 15 Bandar Lampung pada tahun 2022. Penulis melaksanakan Kunjungan Kerja Ilmiah (KKI) dengan tujuan Yogyakarta-Bandung-Jakarta pada Desember tahun 2022.

MOTTO

Hidup adalah seni menggambar tanpa penghapus

-John W. Gardner

PERSEMBAHAN

Penulis mengucapkan puji dan syukur atas rahmat serta karunia yang telah Allah SWT limpahkan kepada penulis, dengan mengharapkan ridho serta keberkahan dari Allah SWT, serta dengan segala kerendahan hati dan ikhlas penulis persembahkan karya ini sebagai salah satu tanda bakti, sayang, dan cinta kasih kepada:

Kedua orang tuaku tercinta

Abi Izwendy dan Bunda Muani yang telah memberikan seluruh cinta, kasih dan sayangnya serta doa yang tanpa henti dilangitkan untuk keberhasilan dan kebahagiaanku. Terima kasih untuk perjuangan, pengorbanan tanpa tapi yang telah diberikan untukku. Terima kasih selalu membersamai setiap langkah penulis. Maafkan jika perjalanan yang aku punya sedikit lebih lambat, tapi percayalah bahwa semuanya sedang aku usahakan. Tolong jangan pernah lelah mendoakan supaya semua perjalanan dipermudah. Semoga Allah SWT selalu melindungi hati, senyuman, serta langkah abi dan bunda selamanya;

Almamaterku tercinta

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

SANWANCANA

Alhamdulillahirabbilalamin puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepala Kampung Bakung Udik Kabupaten Tulang Bawang”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan skripsi sampai dengan terselesaikannya skripsi ini penulis mendapatkan bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Penulis dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung beserta pimpinan dan Staf Rektorat Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Sunyono, M.Si. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Riswandi, M.Pd. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja sama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Albet Maydiantoro, M.Pd. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
5. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;

6. Bapak Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
7. Ibu Dr. Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
8. Bapak Dr. Muhammad Mona Adha, S. Pd., M.Pd. selaku dosen Pembimbing I. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta terima kasih atas bimbingan, ilmu, motivasi, dan nasehat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
9. Bapak Edi Siswanto, S.Pd., M.Pd. selaku dosen pembimbing II. Terima kasih atas bimbingan, dukungan, ilmu, waktu, tenaga, arahan, serta nasehatnya selama ini kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
10. Bapak Drs. Berchah Pitoewas, M.H. selaku dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran dalam proses perbaikan skripsi ini. Terima kasih atas ilmu, motivasi dan nasehat yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Bapak Rohman, S.Pd., M.Pd. selaku dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran dalam proses perbaikan skripsi ini. Terima kasih atas ilmu, motivasi dan nasehat yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Bapak dan Ibu Dosen khususnya Progran Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan, saran, motivasi, serta segala bantuan yang diberikan;
13. Bapak Santori selaku Kepala Kampung Bakung Udik beserta jajarannya dan terima kasih kepada masyarakat Kampung Bakung Udik.
14. Terima kasih untuk diri sendiri, terima kasih tidak pernah berhenti dalam setiap perjuangan. Terima kasih tetap tegar dalam segala kondisi, terima kasih sudah menjadi pribadi yang tidak mudah

menyerah dengan keadaan, terima kasih untuk kesabaran yang selalu diusahakan, terima kasih sudah berani menghadapi ketakutan yang ada, tetap tenang dalam riuhnya diri sendiri, terima kasih karena tetap percaya bahwa di depan sana akan baik-baik saja, dan semoga selalu mempunyai hati yang luas untuk menerima dan memaafkan hal-hal yang sulit diterima;

15. Terima kasih kepada ibuku yang paling cantik dan baik hatinya Bunda Muani, terima kasih untuk seluruh pengorbanan. Terima kasih sudah merawat, menyayangi, mendidik penulis dengan setulus hati dan penuh kesabaran. Terima kasih sudah mencintai penulis dan keluarga dengan sepenuh hati baikmu;
16. Terima kasih kepada ayah paling gagah dan rupawan Abi Izwendu, terima kasih untuk seluruh perjuangan. Terima kasih sudah merawat, menyayangi, mendidik penulis sedemikian baiknya, terima kasih tidak pernah lelah memperjuangkan kebahagiaan penulis;
17. Terima kasih untuk kakak-kakakku Acik Widya, Cak Sahrul, Aak Windra, sudah menyayangi dan melindungi adik bungsu dari banyaknya situasi dan kondisi, menjadi garda terdepan disaat adik membutuhkan. Terima kasih juga untuk kakak iparku Darmawan, Diah Ayu, dan Sofia terima kasih selalu mendukung setiap perjalanan penulis dan mendoakan penulis. Terima kasih untuk keponakanku terkasih Zidane, Maryam, Zubair, Ummu, Muhammad, dan Lathif telah menghibur penulis dalam kepenatan duniawi ini. Terima kasih telah menjadi keluargaku yang menyempurnakan;
18. Terima kasih kepada Gistiana Afifah Susilo, dan Ishmah Nazhari selalu menampung keluh kesah penulis, walaupun tidak sedarah terima kasih selalu searah. Panjang umur persahabatan;
19. Terima kasih kepada teman seperjuanganku Aulia Kirana Arundaya, Aulia Putri Rianda, Dwi Ayu Destyana, Elka Nabila Rahmadian, Gistiana Afifah Susilo, Ishmah Nazhari, Nur Azizah Hasanah, Nurlaili Rahmawati, dan Salsabila Aryanti Putri terima kasih atas

dukungan dan semangat yang selalu diberikan untuk penulis. Terima kasih selalu kebersamai sebagian besar perjalanan penulis sedari remaja hingga kita sampai pada titik memilih tujuannya masing-masing. Semoga Allah selalu meridhoi setiap langkah kita dan menjaga silaturahmi ini tetap terjalin hingga akhir.

20. Terima kasih kepada Al-Fina Damayanti, Anisa Siti Soleha, Salsabila yang telah kebersamai dan menyemangati penulis selama perkuliahan.
21. Terima kasih kepada Alfina Nurhaliza, Puspita, Alief, Kukuh, Arief, Tari, Devia, Anggun, Dean, Uci, Rizal, Debora, Diana Jaya, Senji, Nadya, Lutfi, Shofi terima kasih selalu membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
22. Terima kasih kepada Aliffia, Asa, Anugrah, dan Vira yang selalu setia menjadi teman bermain bulu tangkis ditengah kejenuhan penulis.
23. Teman-teman KKN Desa Bakung Ara, Diah, Ermando, Erlin, Hana, Nabila, dan Winda terima kasih untuk kalian.
24. Terima kasih untuk semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Penulis berharap semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk semua pihak.

Bandar Lampung, 02 Agustus 2024
Penulis,

Wilya Apriyani
NPM. 1953032009

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepala Kampung Bakung Udik Kabupaten Tulang Bawang” yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga Allah SWT selalu memberkahi langkah kita dan memberikan kesuksesan dimasa mendatang serta semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 02 Agustus 2024
Penulis,

Wilya Apriyani
NPM. 1953032009

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
HALAMAN JUDUL	iv
RIWAYAT HIDUP	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
SANWANCANA	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Batasan Masalah.....	7
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
1.6 Manfaat penelitian	8
1.7 Ruang Lingkup Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tinjauan Kesadaran Politik	10
2.2 Partisipasi Politik.....	15
2.3 Pendidikan Politik	29
2.4 Pemilihan Kepala Desa.....	32
2.5 Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 16 Tahun 2021 Tentang	37
2.6 Kajian Penelitian Relevan	41
2.7 Kerangka Pemikiran	43
2.8 Hipotesis	46
III. METODE PENELITIAN.....	47
3.1 Jenis Penelitian	47
3.2 Populasi dan Sampel.....	47

3.3	Variabel Penelitian	50
3.4	Definisi Konseptual dan Operasional.....	51
3.5	Rencana Pengukuran Variabel	53
3.6	Teknik Pengumpulan Data	54
3.7	Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	56
3.8	Teknik Analisis Data	58
IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
4.1	Langkah-Langkah Penelitian	63
4.2	Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian.....	69
4.3	Deskripsi Data Penelitian	72
4.4	Uji Hipotesis.....	95
4.5	Pembahasan Hasil Penelitian.....	97
V.	KESIMPULAN	122
5.1	Kesimpulan.....	122
5.2	Saran.....	122
	DAFTAR PUSTAKA	124
	LAMPIRAN.....	132

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 DPT dan DPTK Kampung Bakung Udik Tahun 2022	5
Tabel 1.2 Jumlah Suara di TPS	6
Tabel 3.1 Populasi Masyarakat Kampung Bakung Udik.....	48
Tabel 3.2 Kriteria Pemilih Kepala Desa	51
Tabel 3.3 Sampel Penelitian.....	52
Tabel 3.4 Koefisien Reliabilitas	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perkembangan Indeks Aspek Aspek IDI Nasional	3
Gambar 2.1 Gambar Hirarki Piramida Partisipasi Politik.....	26
Gambar 2.2 Bagan Kerangka Berpikir.....	45

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (setelah amandemen) pasal 1 ayat (1) berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Demokrasi di Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga sering disebut dengan demokrasi pancasila. Demokrasi Pancasila merintahkan musyawarah untuk mufakat, berdasarkan pada paham kekeluargaan dan gotong royong yang ditujukan pada kesejahteraan yang mengandung unsur-unsur religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur. Demokrasi pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak tetapi harus diselenggarakan dengan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip demokrasi itu adalah persamaan, kebebasan, dan pluralisme (M. Mona Adha dkk,2013)

Konsep demokrasi dapat diartikan sebagai suatu pemerintahan yang berasal dari, oleh, dan untuk rakyat karenanya salah satu pilar demokrasi adalah partisipasi. Bentuk partisipasi politik yang sangat penting dilakukan oleh warga negara adalah keikutsertaan dalam pemilihan umum. Pemilihan kepala desa (pilkades) dianggap sebagai arena demokrasi yang paling nyata di desa, dalam pilkades terjadi kompetisi yang bebas, partisipasi masyarakat, pemilihan secara langsung dengan prinsip *one man one vote* (satu orang satu suara). Indonesia merupakan negara yang menganut sistem ketatanegaraan sebagai negara hukum yang menjamin hak politik (hak pilih) atau kedaulatan warga negara yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selain itu dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 23 Ayat (1) yakni “Setiap orang bebas untuk memilih dan

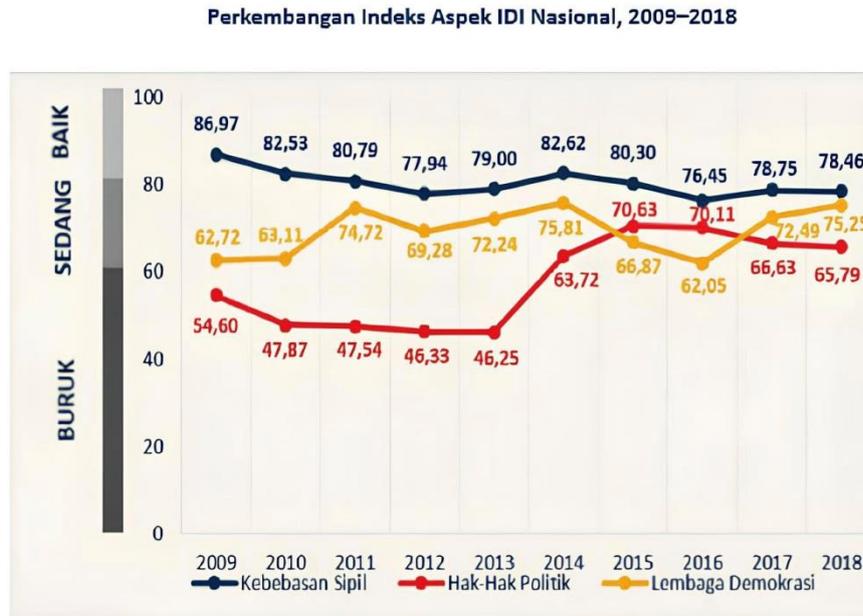
mempunyai keyakinan politiknya” dan Pasal 43 Ayat (1) Tentang Hak Asasi Manusia menunjukkan kewajiban negara dalam menjunjung tinggi hak politik warganya.

Pesta demokrasi di Indonesia ditandai oleh berbagai peristiwa penting dalam proses pemilihan umum dan partisipasi politik masyarakat, beberapa ciri khas dari pesta demokrasi Indonesia antara lain: 1) pemilihan umum, 2) kampanye politik, 3) debat politik, 4) partisipasi masyarakat, 5) kemeriahan dan proses demokrasi. Peserta demokrasi tersebut tentunya terdapat sumbangsi dari masyarakat sebagai rakyat yang memiliki andil dalam memberikan amanah bagi pemimpin atau pemerintah. Wujud yang dapat dilakukan masyarakat yaitu dengan ikut berpartisipasi aktif dalam politik.

Masalah partisipasi politik masyarakat sangat menarik untuk ditelaah dalam artian partisipasi politik yang dimaksudkan bukan dilihat dari hasil jumlah suara semata yang telah dimenangkan oleh peserta pemilihan umum, akan tetapi dilihat dari kemampuan dan tingkat kesadaran masyarakat dalam menentukan pilihannya yang terbaik sesuai dengan hati nurani tanpa ada tekanan dari pihak lain. Diketahui bahwa angka hasil pemilihan umum hanya memberikan gambaran kasar mengenai partisipasi politik (Anggraini & Zetra, 2015).

Berikut ini adalah indeks demokrasi di Indonesia yang semakin meningkat:

Gambar 1.1 Perkembangan Indeks Aspek Aspek IDI Nasional



Sumber: BPS 2019

Berdasarkan gambar 1.1 maka dapat dilihat bahwa Indeks Demokrasi Indonesia pada tahun 2018 mencapai angka 72,39 yang meningkat tipis jika dibandingkan IDI di tahun 2017 yakni sebesar 72,11. Dengan angka sebesar itu demokrasi di Indonesia tetap berada di dalam kategori sedang. Partisipasi masyarakat merupakan keharusan dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, namun demikian rendahnya partisipasi pemilih menjadi gejala umum dalam pemilihan kepala desa di beberapa wilayah dan kemungkinan fenomena rendahnya partisipasi pemilih ini juga akan menjadi gejala umum pemilu Indonesia di masa mendatang, hingga saat ini belum ada penjelasan yang memadai apa yang menyebabkan seseorang pemilih untuk tidak ikut memilih, berbagai penjelasan mengenai rendahnya partisipasi pemilih di Indonesia hingga saat ini masih didasarkan pada asumsi dan belum didasarkan pada riset yang kokoh. Pengamat dan penyelenggara pemilu memang kerap melontarkan pendapat tentang penyebab rendahnya tingkat partisipasi pemilih, tetapi berbagai penjelasan itu didasarkan pada pengamatan dan bukan berdasarkan hasil riset. Pemahaman mereka tentang demokrasi pada umumnya adalah masyarakat dapat ikut menentukan siapa

yang memimpin mereka melalui pemilu (pilkades), namun hal lain yang diungkapkan adalah adanya penilaian bahwa tidak ada calon kepala desa yang memenuhi kriteria sebagai pemimpin yang baik, dengan kalimat lain dapat dinyatakan bahwa ketidakhadiran mereka dalam pilkades bukan disebabkan karena sistem pilkades yang tidak demokratis. Rendahnya partisipasi masyarakat merupakan masalah nasional, sehingga penggunaannya tidak melulu diserahkan pada salah satu pihak, diperlukan keikutsertaan seluruh komponen bangsa untuk menangani masalah ini.

Pemilihan kepala desa merupakan salah satu sarana yang digunakan dalam menentukan sosok seseorang yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dan diharapkan dapat mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Peranan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa menjadi satu hal yang sangat penting, karena sangat menentukan bagi keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan.

Reformasi politik mendorong kembali partisipasi politik rakyat melalui penyelenggaraan otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah secara langsung. Menurut Vontz dalam (Adha, 2021) warga negara harus memiliki kemampuan dan pengetahuan agar bisa berpartisipasi dalam kehidupan politik, hal-hal berkaitan dengan kepentingan umum dan aspek-aspek lain, secara harfiah partisipasi berarti keikutsertaan, untuk memaknai partisipasi dalam konteks politik dapat dikatakan sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan masyarakat yang dimaksud adalah kemauan warga untuk melihat, mengkritisi serta ikut terlibat secara aktif dalam setiap proses politik.

Pemilihan kepala desa tidak terlepas dari partisipasi politik masyarakat desa, partisipasi politik pada hakikatnya sebagai ukuran untuk mengetahui kualitas kemampuan warga negara dalam menginterpretasikan sejumlah simbol kekuasaan (kebijaksanaan dalam mensejahterakan masyarakat sekaligus langkah-langkahnya) kedalam simbol-simbol pribadi.

Partisipasi secara harfiah berarti keikutsertaan, untuk memaknai partisipasi dalam konteks politik dapat dikatakan sebagai bentuk keikutsertaan warga

dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga yang dimaksud adalah kemauan warga untuk melihat, mengkritisi serta ikut terlibat secara aktif dalam setiap proses politik. Kematangan demokrasi akan tergantung seberapa besar partisipasi politik masyarakat. Partisipasi politik sebagai wujud dari keikutsertaan warga negara dalam menjalankan kedaulatannya berdasarkan kesadaran sendiri. Pemilihan kepala desa yang dilaksanakan langsung merupakan wujud dari demokrasi, pilihan kepala desa secara langsung memberikan kesempatan pada masyarakat untuk dapat secara nyata ikut berpartisipasi aktif dalam politik serta menggunakan hak pilih dan memilih tanpa tekanan dan pihak manapun sehingga pilihan kepala desa berlangsung secara demokratis (Adha, 2013).

Kampung Bakung Udik merupakan salah satu desa yang berada di Provinsi Lampung, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang.

Kampung Bakung Udik memiliki jumlah penduduk 1.680 jiwa dengan 471 kepala keluarga. Berdasarkan data yang didapat oleh penulis pada saat penelitian pendahuluan bahwa terdapat daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar pemilih tetap khusus (DPTK) untuk pemilihan kepala desa Kampung Bakung Udik tahun 2022. Berikut data DPT dan DPTK Kampung Bakung Udik, Kabupaten Tulang Bawang:

Tabel 1.1 Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tetap Khusus Kampung Bakung Udik Tahun 2022

No	Dusun	Daftar Pemilih Tetap (DPT)			Daftar Pemilih Tetap Khusus (DPTK)			Jumlah Total		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Dusun 01	124	98	222	2	3	5	126	101	227
2	Dusun 02	121	109	230	1	2	3	122	111	233
3	Dusun 03	225	242	467	3	5	8	228	247	475
4	Dusun 04	181	153	334	4	2	6	185	155	340
Jumlah		651	602	1.253	10	12	22	661	614	1.275

Sumber : panitia pemilihan kepala desa Kampung Bakung Udik Tahun 2022

Berdasarkan tabel 1.1 merupakan data yang diperoleh oleh penulis saat penelitian pendahuluan bahwa terdapat daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar pemilih tetap khusus (DPTK) untuk pemilihan kepala desa Kampung Bakung Udik, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang. Berdasarkan data tabel di atas jumlah total dari DPT dan DPTK di Kampung Bakung Udik berjumlah 1.275 pemilih yang akan ikut berpartisipasi pada pemilihan kepala desa. Setelah berlangsungnya kegiatan pemilihan kepala desa Kampung Bakung Udik, maka diperoleh hasil suara dari masing-masing TPS seperti yang telah penulis lampirkan sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jumlah Suara di Tempat Pemungutan Suara

No	TPS	L	P	TOTAL
1	TPS 1	241	210	451
2	TPS 2	218	206	424
3	TPS 3	168	171	339
Jumlah		627	587	1.214

Sumber: panitia pemilihan kepala desa Kampung Bakung Udik Tahun 2022

Berdasarkan tabel 1.2 merupakan data jumlah suara yang ada di setiap TPS secara keseluruhan yang berpartisipasi pada pemilihan kepala desa Kampung Bakung Udik, Kabupaten Tulang Bawang didapati sebanyak 1.214 suara, sedangkan jumlah keseluruhan DPT dan DPTK berjumlah 1.275 yang mana jika kita perhatikan terdapat 61 suara yang tidak berpartisipasi pada saat pemilihan kepala desa berlangsung. Penulis saat melakukan penelitian pendahuluan juga melakukan wawancara dengan panitia pemilihan kepala desa mengenai alasan mengapa masih terdapat masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya pada saat itu, dan didapat jawaban bahwasannya sebagian masyarakat tidak bisa menghadiri kegiatan tersebut dikarenakan harus bekerja dan kurangnya minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pilkades.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, belum diketahui secara pasti faktor apa yang menjadi penyebab masyarakat Kampung Bakung Udik yang tidak berpartisipasi pada pemilihan kepala desa, maka sangat penting untuk dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah kesadaran politik memengaruhi partisipasi politik masyarakat Kampung Bakung Udik, Kabupaten Tulang Bawang pada pemilihan kepala desa tahun 2022. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepala Kampung Bakung Udik Kabupaten Tulang Bawang”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, identifikasi masalah pada penelitian ini diantaranya adalah:

1. Sebagian masyarakat lebih memilih bekerja daripada menghadiri pemilihan kepala desa.
2. Masyarakat Kampung Bakung Udik, Kabupaten Tulang Bawang masih kurang mempunyai kesadaran politik.
3. Masyarakat Kampung Bakung Udik, Kabupaten Tulang Bawang kurang berpartisipasi aktif dalam pemilihan kepala desa.

1.3 Batasan Masalah

Agar masalah dalam penelitian ini lebih fokus, maka penulis membatasi penelitian ini pada permasalahan sebagai berikut:

1. Partisipasi politik yaitu kegiatan masyarakat secara sukarela dalam memilih pemimpin desa di Kampung Bakung Udik, Kabupaten Tulang Bawang.
2. Kesadaran politik yaitu kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini berkaitan dengan pengetahuan seseorang tentang politik.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah yang ada maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana pengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi politik masyarakat Kampung Bakung Udik, Kabupaten Tulang Bawang dalam pemilihan kepala kampung?”

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi politik pada pemilihan kepala desa di Kampung Bakung Udik, Kabupaten Tulang Bawang.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian tentang pengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi politik. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan, pertimbangan, dan pengembangan bagi penelitian di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Program Studi PPKn khususnya, penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dan pengetahuan tentang sistem politik Indonesia dalam kaitannya dengan partisipasi dan kesadaran politik masyarakat dalam menggunakan hak pilih.
- b. Bagi Masyarakat, sebagai referensi mengenai pentingnya kesadaran politik masyarakat dalam menggunakan hak pilih.
- c. Bagi pemerintah, sebagai informasi agar dapat memberikan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1. Lingkup Ilmu

Ruang lingkup ini termasuk dalam ruang lingkup Ilmu Politik dan Kenegaraan, yang mana ruang lingkup ini mengkaji mengenai aspek-aspek hak dan kewajiban warga negara, peran serta dalam melakukan pemecahan masalah sosial dan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Subjek Penelitian

Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah masyarakat Kampung Bakung Udik, Kabupaten Tulang Bawang.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah membahas tentang “Pengaruh Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepala Desa Kampung Bakung Udik, Kabupaten Tulang Bawang”.

4. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penulis di Kampung Bakung Udik, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang.

5. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan oleh penulis setelah dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan oleh pihak Dekanat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung pada 21 Juli 2022 dengan nomor surat: **4730/UN26.13/PN.01.00/2022**

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Kesadaran Politik

1. Deskripsi Kesadaran Politik

Kesadaran politik berarti menyangkut tentang pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat atau situasi politik yang menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap hak dan kewajibannya di lingkungan masyarakat. Kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara (Surbakti, 2010). Kesadaran politik seseorang juga menyangkut seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik di sekitarnya (Averus dkk, 2020).

Kesadaran politik erat kaitannya dengan partisipasi politik, karena semakin sadar dirinya diperintah, kemudian semakin orang menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintahan (Budiardjo, 2008). Kesadaran politik merupakan perasaan bahwa dirinya diperintah dan percaya bahwa mereka dapat sedikit banyak memengaruhi pemegang kekuasaan atau percaya bahwa mereka memiliki efek (Ramlan Surbakti, 2013). Kesadaran politik diartikan sebagai kesadaran akan hak dan kewajiban seseorang sebagai warga negara. Hal ini berkaitan dengan pengetahuan tentang lingkungan sosial politik, serta minat dan perhatiannya terhadap pemerintah. Tidak hanya itu, kesadaran politik juga berkaitan dengan sikap dan kepercayaan seseorang terhadap sistem politik. Penilaian seseorang terhadap pemerintah, dipercaya atau tidak, disukai atau tidak.

(Sasikala dkk, 2017) *“political awareness is the ability of human beings to acquire and possess political knowledge through perception, reasoning, or intuition”* (kesadaran politik adalah kemampuan manusia

untuk memperoleh dan memiliki pengetahuan politik melalui persepsi, penalaran, atau intuisi).

Teori tersebut dapat dikatakan bahwa kesadaran politik merupakan suatu kondisi pemahaman tentang pengetahuan politik, nilai-nilai, dan orientasi politik, yang memungkinkan seseorang untuk mencari solusi dari berbagai problematika dalam masyarakat, memberikan keputusan dan menentukan sikap terhadapnya, sehingga dapat merubah atau mengembangkannya. Kesadaran politik menyangkut pengetahuan tentang politik dan nilai-nilai konstitusi yang mengatur dalam kehidupan politik. Pengetahuan tersebut akan melahirkan suatu penghargaan terhadap sistem politik. Kesadaran atau ketaatan terhadap politik akan terwujud, apabila telah terdapat suatu penghayatan terhadap konstitusi dengan sendirinya.

Kesadaran politik pada dasarnya menyangkut tentang pengetahuan, minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik. Kesadaran politik dianggap penting dalam kehidupan bernegara mengingat kepentingan dan permasalahan dalam negara yang sangat kompleks. Perlu adanya dukungan yang positif dari masyarakat, sehingga kepentingan dan permasalahan dalam negara dapat diwujudkan dan diselesaikan dengan baik. Aspek penting dalam kesadaran politik adalah kesadaran seseorang akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, seperti halnya hak politik, hak ekonomi, hak mendapatkan perlindungan, kesehatan pendidikan dan kewajiban-kewajiban dalam sistem politik, seperti kewajiban taat terhadap hukum, bersosialisasi baik dengan masyarakat, dan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, dan kewajiban lainnya. Kesadaran politik ini akan berkorelasi dengan partisipasi politik seseorang, semakin tinggi kesadaran politik seseorang, maka partisipasinya semakin aktif, begitupun sebaliknya (Cholisin dkk, 2012).

Penulis dapat menyimpulkan berdasarkan definisi di atas, bahwa kesadaran politik adalah suatu konsep dasar seseorang yang ditandai dengan pemahaman, pengertian, dan penghayatan tentang sistem politik di tengah-tengah lingkungan masyarakat disekitarnya, sehingga berdampak positif terhadap perilaku atau tindakan untuk menaati sistem politik, aturan hukum, dan norma-norma dalam masyarakat termasuk mengerti atas hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik.

2. Indikator Kesadaran Politik

Indikator kesadaran politik menjadi acuan untuk mengukur seberapa tinggi taraf kesadaran politik seseorang, atau dengan kata lain, merupakan alat untuk mengukur kesadaran politik seseorang. Kesadaran politik berorientasi pada aspek psikologi seseorang mengenai kesadarannya terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Maka dari itu kriteria untuk mengetahui kesadaran politik ada dua hal, yaitu: 1. Mengenai pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat tempat tinggalnya; 2. Mengenai minat dan perhatian seseorang terhadap situasi politik di lingkungannya.

Pendapat yang serupa diungkapkan oleh Fatwa (2016) bahwa untuk mengukur kesadaran politik, indikator yang dapat digunakan adalah sebagai berikut: 1. Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. 2. Kesadaran perlunya pemerintah yang legitimate/sah. 3. Kesadaran perlunya mengikuti perkembangan informasi politik. 4. Kesadaran perlunya mengikuti kegiatan politik.

Gabriel Almond dan Sidney Verba (1990) menjelaskan ada 3 pola kesadaran politik, yaitu:

1. Kesadaran input adalah keadaan seseorang dengan sadar terlibat dalam sistem politik dan mengikuti atau menaruh perhatian pada urusan-urusan pemerintahan dan politik. Input dalam hal ini berupa dukungan atau tuntutan terhadap sistem politik. Bentuk tuntutan input dapat muncul dari pengaruh lingkungan atau dalam sistem

politik itu sendiri. Dukungan input menjadi tindakan atau orientasi yang menunjukkan dan mempertahankan sistem politik. Kesadaran input dapat diukur dari bagaimana mereka mengerti isi pemberitaan politik, memahami sistem pemilu, mengikuti rapat di masyarakat dan aktif dalam organisasi dalam masyarakat, mencakup sejauh mana seseorang tahu dan memahami isu-isu politik yang sedang berlangsung, kebijakan publik, partai politik, pemimpin politik, dan sebagainya. Kesadaran politik input adalah dasar bagi kesadaran politik output, karena individu yang memiliki pengetahuan politik yang kuat cenderung lebih mungkin terlibat dalam aktivitas politik.

2. Kesadaran output adalah keadaan seseorang dengan sadar mengetahui dan merasakan dampak kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah dalam kehidupannya. Kesadaran output diukur melalui beberapa indikator, seperti pendapat pemilih terhadap kebijakan pemerintah saat ini, pengetahuan mereka tentang peraturan pemerintah, dan perasaan mereka terkait kebijakan tersebut, kemampuan kebijakan pemerintah dalam memengaruhi kehidupan mereka, sejauh mana kesadaran politik individu mendorong mereka untuk terlibat dalam aktivitas politik yang nyata.
3. Penerimaan informasi politik dan merasakan kebebasan dalam memberikan opini. Sejauh mana penerimaan informasi politik pemilih dapat diukur melalui beberapa indikator, diantaranya apakah mereka mengenal nama pejabat publik, mengenal nama-nama menteri, nama-nama partai politik, dan kebebasan mereka dalam mengungkapkan opininya di depan umum. Kesadaran politik input dan penerimaan informasi politik adalah langkah awal dalam proses pengembangan kesadaran politik output. Bagaimana seseorang memproses, memahami, dan merespons informasi politik yang mereka terima akan memengaruhi tindakan politik mereka. Kesadaran politik output adalah hasil dari kesadaran politik input yang direspons dengan partisipasi politik atau tindakan yang relevan.

Kesadaran politik menjadi variabel independen. Indikator yang digunakan untuk mengukur kesadaran politik mengacu pada tiga pola kesadaran politik menurut Almond dan Verba, yaitu:

1. Kesadaran input, tingkat pengetahuan dan pemahaman individu tentang isu-isu politik, sistem politik.
2. Kesadaran output adalah sejauh mana kesadaran politik individu mendorong mereka untuk terlibat dalam aktivitas politik yang nyata.
3. Penerimaan informasi dan pemberian opini, bagaimana seseorang menerima dan mengakses informasi politik.

3. Faktor Yang Memengaruhi Kesadaran Politik

Surbakti (2010) mengatakan kesadaran politik menjadi salah satu variabel penentu partisipasi politik seseorang disamping kepercayaan politik. Kesadaran politik tidaklah menjadi variabel yang berdiri sendiri atau dengan kata lain bukan variabel yang independen. Ada faktor-faktor lain yang memengaruhi kesadaran politik, antara lain: 1. Status sosial; 2. Status ekonomi; 3. Afiliasi politik orang tua; 4. Pengalaman berorganisasi. Empat faktor inilah yang menentukan tinggi rendahnya kesadaran politik seseorang sehingga akan berdampak pada partisipasi politik.

Pendapat tentang faktor yang memengaruhi kesadaran politik, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor tersebut terbagi dalam dua garis besar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan keadaan individu yang bersangkutan, yaitu kondisi psikologis seorang individu yang mencakup tentang kondisi emosional terhadap suatu sistem politik baik pada instrumen maupun institusinya, orientasi terhadap situasi politik, dan orientasi terhadap tokoh atau aktor politik. Faktor eksternal berkaitan dengan kondisi yang ada di luar individu, yaitu faktor status sosial, seperti tingkat pendidikan, kondisi perekonomian, pekerjaan, profesi, kedudukan dan lain sebagainya.

Goren (2012) mengatakan bahwa *“political awareness allows one to better link one’s predispositions to policies, candidates, or parties”*

(kesadaran politik memungkinkan seseorang untuk lebih memiliki kecenderungannya dengan kebijakan, kandidat, atau partai dengan lebih baik).

Faktor jenis kelamin (*gender*) juga dapat memengaruhi tingkat kesadaran politik seseorang, seperti yang diungkapkan oleh Ahmed et al. (2015) *“the level of political awareness among the female students was comparatively low as compare to the male respondents”* (tingkat kesadaran politik di kalangan mahasiswa perempuan relatif lebih rendah dibandingkan dengan responden laki-laki). Pengaruh tinggi kesadaran politik terhadap partisipasi pemilih pria dalam kegiatan pemilihan umum, tetapi terdapat dampak terbatas pada kesadaran politik pada pemilih perempuan. Pendapat yang sama diungkapkan oleh Ebrahimi (2016) *“that meaningful correlation exists between level of political awareness of women and their degree of social participation* (bahwa ada korelasi yang berarti antara tingkat kesadaran politik perempuan dan tingkat partisipasi sosial mereka).

2.2 Partisipasi Politik

1. Deskripsi Partisipasi Politik

Partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program tertentu dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi demi tercapainya tujuan program tersebut (Adha, 2013).

Kehidupan sosial bangsa Indonesia mengalami perkembangan yang pesat dalam berbagai lapisan masyarakat. Realitas kehidupan bangsa Indonesia saat ini dikhawatirkan mengalami kemunduran dalam semangat kebersamaan yang merupakan bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia yang dulu dikenal dengan bangsa yang ramah, rukun, karena merasa memiliki kesamaan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, namun kini dikenal

dengan bangsa yang mudah marah dan tersinggung, sehingga kita disuguhkan dengan berita-berita kerusuhan dan kriminal diberbagai media. Pemahaman yang mendalam dan komitmen yang kuat terhadap rasa kebersamaan dalam masyarakat yang beragam dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan pancasila dan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sulaksono, 2018).

(Adha, 2019) mengemukakan warga negara yang memahami dan mampu berpartisipasi aktif di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah warga negara yang mampu berpikir secara kritis dalam memberikan respon dalam aktivitas kehidupannya. Berpartisipasi aktif merupakan pribadi yang bertanggung jawab dan mampu bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, kemudian partisipasi secara aktif berarti seseorang secara terus menerus mampu mengembangkan keterampilan sosial dan kompetensi kewarganegaraannya.

Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama (Syafiie, 2015). Partisipasi adalah turut sertanya seseorang baik secara mental maupun secara emosional untuk memberikan sumbangan kepada proses pembuatan keputusan terutama keterlibatan pribadi orang yang bersangkutan melaksanakan tanggung jawab untuk melakukan hal tersebut (Jisokhi et al., 2020).

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (Adha, 2014). Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak perencanaan, pembuatan keputusan, sampai dengan penilaian

keputusan termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Peran warga dalam partisipasi politik tersebut, selama ini bisa dikatakan masih sangat kurang.

Partisipasi politik masyarakat merupakan ciri khas modernisasi politik, disini kemajuan demokrasi dapat dilihat sampai seberapa besar partisipasi politik masyarakat disertakan, sehingga partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik merupakan prasyarat mutlak dalam sebuah tatanan negara yang demokratis. Hal ini didasari bahwa masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam penyelenggaraan demokrasi seperti halnya pemilihan umum. Masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan pemilihan umum karena merupakan satu kesatuan yang utuh dan menjadi faktor utama serta penentu berjalan suksesnya sebuah pelaksanaan pemilihan umum (Zarkasi et al., 2023).

Kematangan demokrasi akan tergantung seberapa besar partisipasi politik masyarakat. Partisipasi politik sebagai wujud dari keikutsertaan warga negara dalam menjalankan kedaulatannya berdasarkan kesadaran sendiri. Pemilihan kepala desa yang dilaksanakan langsung merupakan wujud dari demokrasi, pilihan kepala desa secara langsung memberikan kesempatan pada masyarakat untuk dapat secara nyata ikut berpartisipasi aktif dalam politik serta menggunakan hak pilih dan memilih tanpa tekanan dan pihak manapun sehingga pilihan kepala desa berlangsung secara demokratis (Adha, 2013).

Partisipasi politik adalah keikutsertaan masyarakat pada aktivitas serta kegiatan politik, baik dalam rangkaian pemilihan ataupun aktivitas. Partisipasi mengacu pada keikutsertaan masyarakat umum (tanpa kekuasaan) berpartisipasi dalam proses memengaruhi perumusan dan terlaksananya perpolitikan dalam bentuk kebijakan publik. Aktivitas masyarakat dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu: (1) aktivitas yang dapat berpengaruh pada kebijakan publik; (2) berpartisipasi dalam perumusan serta pelaksanaan keputusan politik. Artinya, partisipasi politik adalah

sejenis perilaku politik dan tidak mesti ada dalam bentuk partisipasi politik (Suparto, 2020).

(Syahrial, 2011) partisipasi politik merupakan aktivitas individu ataupun sekelompok orang yang aktif berpartisipasi pada perpolitikan, contohnya saat menentukan presiden dalam pemilu, ikut aktif dalam memberikan pengaruh pada kebijakan pemerintah.

(Herbert McClosky, 2012) menjelaskan partisipasi politik merupakan aktivitas ikhlas masyarakat dengan cara masyarakat ikut menjalankan proses memilih pemimpin serta terlibat pada rangkaian dibentuknya kebijakan publik, bisa dengan terlibat langsung maupun tidak langsung. Penjelasan diatas dapat disimpulkan tentang makna partisipasi politik, yaitu:

- a. Aktivitas politik masyarakat biasa sebagai warga negara dapat dilakukan dengan langsung maupun tidak langsung.
- b. Aktivitas ini tujuannya sebagai upaya memengaruhi pemerintah dalam memutuskan kebijakan bisa dengan rayuan, dan juga penolakan pada tokoh politik serta pemerintah.
- c. Aktivitas ditujukan sebagai upaya memengaruhi pemerintah tanpa berpikir hal yang muncul dan apakah gagal atau berhasil.
- d. Aktivitas dijalankan bisa dengan cara yang wajar serta tanpa kekerasan ataupun dengan prosedur diluar kewajaran dalam bentuk kekerasan.

Partisipasi politik merupakan adanya keterlibatan masyarakat dalam membuat keputusan yang akan berdampak pada hidupnya. Masyarakat yang berperan dalam melakukan kegiatan politik itu merupakan masyarakat yang memiliki posisi di pemerintahan, serta masyarakat umum tidak punya jabatan. Pemerintah punya kewenangan baik perencanaan maupun pelaksanaan keputusan politik. Masyarakat berhak memengaruhi pada langkah proses dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga biasa dalam menentukan

segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi kehidupannya (Suparto, 2020).

2. Tujuan Partisipasi Politik

Tujuan dari partisipasi adalah untuk mempertemukan seluruh kepentingan yang sama dan yang berbeda dalam suatu proses perumusan dan penetapan kebijakan (keputusan) secara profesional untuk semua pihak yang terlibat dan terpengaruhi oleh kebijakan yang akan ditetapkan didalamnya yang cukup kuat terhadap suatu proses pembangunan (Jisokhi et al., 2020).

Tujuan partisipasi politik bagi Kaase dan Marsh dimaksudkan untuk memengaruhi kebijakan yang akan diambil pemerintah maupun pemilihan pemimpin (pejabat pemerintah). Pendapat ini didukung gagasan Miriam Budiarto kegiatan partisipasi politik ini berupa memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Huntington dan Nelson mengatakan kegiatan partisipasi politik hanyalah kegiatan yang dimaksudkan untuk memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah yang ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah yang memiliki wewenang politik.

Tujuan partisipasi politik secara umum untuk memengaruhi proses-proses politik dalam penentuan pengambilan kebijakan yang dilakukan pemerintah. Partisipasi politik harus benar-benar dilakukan oleh masyarakat agar kebijakan yang diambil pemerintah berpihak dan memperhatikan kepentingan masyarakat. Tujuan masyarakat memiliki partisipasi politik dalam kehidupan bernegara adalah mewujudkan sistem politik yang berbasis pada perwakilan rakyat.

3. Indikator Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik seperti memilih

pemimpin negara, yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (Budiardjo, 2015).

Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela warga masyarakat melalui mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum, kegiatan itu mencakup tindakan politik seperti memberikan suara dalam pemilihan umum menghadiri kampanye, mengadakan lobi dengan politikus atau pemerintah (Herbert McClosky, 2015). Huntington dan Nelson menyatakan bahwa partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, dengan maksud memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisasi atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, dan efektif atau tidak efektif. Justru itu partisipasi politik mencakup banyak aspek, termasuk keterlibatan yang tidak sukarela (Huntington dan Nelson, 2015).

Teori Huntington dan Nelson dengan indikator sebagai berikut:

1. Partisipasi politik menyangkut kegiatan-kegiatan dan bukan sikap-sikap
2. Subjek partisipasi politik adalah warga negara atau orang perorangan dalam peranannya sebagai warga negara biasa, bukan orang-orang profesional di bidang politik
3. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan memengaruhi pemerintah terlepas apakah tindakan itu mempunyai efek atau tidak.

Kaase dan Marsh membagi partisipasi politik dalam dua bentuk, yaitu partisipasi politik konvensional dan non-konvensional. Bentuk partisipasi politik konvensional adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan warga negara biasa untuk memengaruhi hasil akhir dari proses politik yang sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku. Bentuk partisipasi politik non-konvensional adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan

warga negara biasa untuk memengaruhi hasil akhir dari proses politik yang tidak sesuai dengan norma hukum dan kebiasaan yang mengatur partisipasi politik.

Pembagian partisipasi politik secara konvensional dan non-konvensional juga dikemukakan Gabriel Almond dengan definisi yang sedikit berbeda. Partisipasi politik konvensional, yaitu bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern. Partisipasi politik non-konvensional, yaitu bentuk partisipasi politik yang tidak lazim dilakukan dalam kondisi normal bahkan dapat berupa kegiatan ilegal penuh kekerasan dan revolusioner.

Verba dan Kim (1978) menyebutkan empat dimensi partisipasi politik yang serupa, yaitu:

1. Ikut serta dalam kegiatan terkait pemilihan umum
2. Ikut serta dalam kegiatan terkait kampanye
3. Aksi politik damai seperti menandatangani petisi, mengontak pejabat publik, demokrasi, boikot dan mogok
4. Aksi politik dengan menggunakan kekerasan seperti merusak sarana publik bentrok dengan petugas keamanan, pengeboman.

Surbakti (2007) membedakan tipe partisipasi masyarakat kedalam empat macam, yaitu:

a. Partisipasi Aktif

Kegiatan warga negara yang senantiasa menampilkan perilaku tanggap (responsif) terhadap berbagai tahapan kebijakan pemerintah atau dengan kata lain apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi, maka partisipasi politik cenderung aktif.

b. Partisipasi Militan- Radikal

Kegiatan warga negara yang senantiasa menampilkan perilaku tanggap (responsif) terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Berbeda dari partisipasi aktif, yang cenderung mengutamakan cara-cara konvensional,

partisipasi ini cenderung mengutamakan cara-cara non-konvensional, termasuk di dalamnya cara-cara kekerasan atau dengan kata lain apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah, maka akan melahirkan militan radikal.

c. Partisipasi Pasif

Kegiatan warga negara yang menerima atau menaati begitu saja segala kebijakan pemerintah. Partisipasi pasif cenderung tidak mempersoalkan apapun kebijakan politik yang dibuat pemerintah atau dengan kata lain apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi, maka akan melahirkan partisipasi yang tidak aktif (pasif).

d. Partisipasi Apatis

Kegiatan warga negara yang tidak mau tahu dengan apapun kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Umumnya, warga masyarakat bertindak demikian karena merasa kecewa dengan pemerintah dan sistem politik yang ada atau dengan kata lain apabila seseorang tingkat kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah, maka partisipasi politik cenderung pasif (apatitis).

4. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Partisipasi Politik

Samuel P. Huntington serta Joan Nelson dalam (Suparto, 2020) menjelaskan tentang partisipasi politik yang ada di Indonesia bisa dengan dua cara, yaitu:

- a. Partisipasi politik otonom, merupakan sebuah partisipasi karena kesadaran sendiri.
- b. Partisipasi politik karena adanya dorongan atau pengaruh dari luar.

Umumnya partisipasi otonom karena dipahaminya persepsi objek politik secara penuh. Pemahaman tadi membuat pengertian lengkap terhadap kenyataan pada objek politik, yang menyebabkan afeksi pada wujud keputusan yang berpihak kepada objek politik tertentu dengan penuh kesadaran tidak ada tekanan atau paksaan.

Kebalikannya partisipasi politik yang dikoordinir keluar disebabkan adanya tekanan sejumlah faktor asal dari eksternal pelaku politik tadi serta umumnya mengesampingkan proses membangun konsep dari persepsi pada kejadian objek politik. Sebagai akibatnya partisipasi semacam ini umumnya cirinya insidental serta tidak abadi, sebab adanya saingan dan aneka macam hal yang bisa berpengaruh pada keputusan keberpihakan seseorang pada objek politik *eksklusif*. Karena sebab ini banyak yang mengakibatkan muncul *oportunisme* seorang pada politik.

Ramlan Surbakti dalam (Santoso, 2020) menjabarkan tentang berbagai hal yang dianggap bisa menghipnotis besar kecilnya partisipasi politik individu adalah masalah kesadaran politik, mencakup kinerja pemerintah, partai politik serta rasa percaya masyarakat. Kesadaran politik artinya kesadaran adanya hak serta kewajiban menjadi rakyat dalam lingkup sebuah negara.

Kondisi sosial merupakan status seorang pada masyarakat sebab adanya berbagai faktor bisa dari derajat orang tua, tingkatan lulusan sekolah serta status pekerjaan. Kondisi ekonomi merupakan status yang berkaitan pada lapisan warga sesuai jumlah harta yang dimiliki. Kaitannya dengan harta bisa terlihat berasal dari jumlah pendapatan, serta pengeluaran, bisa juga dari kepemilikan harta benda lainnya. Seorang yang mempunyai kedudukan tinggi baik secara ekonomi maupun sosial, bukan saja mempunyai pengetahuan tentang perpolitikan, tapi biasanya mempunyai keinginan serta perhatian di bidang politik (ada keinginan jadi pejabat).

Kesadaran politik rakyat sebagai bagian dari negara merupakan faktor penentu partisipasi politik rakyat, yaitu berbagai pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban terkait pemanfaatan lingkungan hidup rakyat dan kegiatan politik merupakan besaran dan tingkat partisipasi seseorang dalam politik. Warga negara yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik seperti pada saat pemilu dengan memberikan hak suara ataupun aktivitas lain untuk berpartisipasi pada

jalannya pemilu, terdorong oleh keyakinan tentang aktivitas dilaksanakan rakyat tersebut untuk kepentingan serta menentukan calon pemimpin terpilih guna kesejahteraan masyarakat.

5. Tipologi Partisipasi Politik

Sikap politik seseorang bisa dilihat wujud partisipasi politik yang dijalankannya. Ada beberapa cara untuk menghasilkan kategori atau jenis partisipasi politik. Klasifikasi partisipasi politik menurut Surbakti, Miriam Budiardjo, Mas'oeed, dan Mc Andrews (Cholisin dan Nasiwan, 2012) misalnya dibagi menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Sesuai dengan tingkat, frekuensi dan intensitas kesadaran politik, partisipasi reguler dan non-konvensional dalam politik. Tipe politik tersebut adalah:

- a. Digolongkan menjadi partisipasi aktif serta partisipasi pasif.

Partisipasi aktif artinya aktivitas berdasarkan berorientasi pada proses input serta hasil politik, adapun partisipasi pasif adalah aktivitas berorientasi pada output.

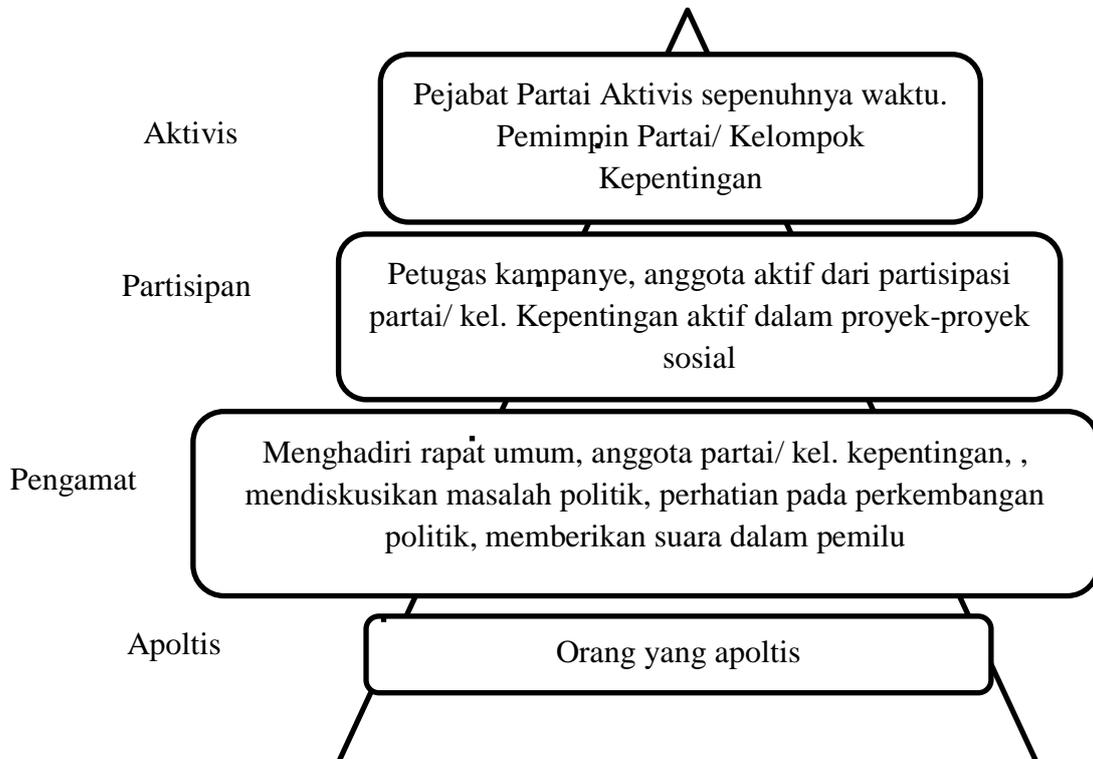
Partisipasi aktif mencakup kegiatan rakyat sebagai warga negara usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang tidak sama dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik serta saran perbaikan buat meluruskan permasalahan, membayar pajak, dan ikut dan pada aktivitas pemilihan pimpinan pemerintahan.

Partisipasi pasif, diantaranya bisa berupa bentuk kegiatan mentaati peraturan/perintah, menerima serta melaksanakan semua keputusan pemerintah.
- b. Klasifikasi partisipasi politik dari perspektif stratifikasi sosial. Olsen berpendapat bahwa partisipasi politik ditinjau dari perspektif stratifikasi sosial, meliputi enam tingkatan, yaitu: pemimpin politik, aktivis politik, dan komunikator (menerima dan menyampaikan ide, pemikiran, sikap, dan informasi politik baru lainnya kepada orang lain (rakyat), komunitas nasional, orang-orang yang terpinggirkan

(mereka yang jarang menandatangani kontrak politik), dan orang-orang yang terisolasi (partisipasi sporadis dalam politik).

- c. Klasifikasi partisipasi politik menurut tingkat kesadaran politik dilihat dari kesadaran politik dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah (sistem politik), partisipasi dibagi menjadi empat jenis. Partisipasi aktif, partisipasi aktif dalam depresi (tidak peduli), partisipasi radikal dan partisipasi pasif. Seseorang memiliki pencerahan politik dan tingkat kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah, maka partisipasinya sering aktif, begitu pula sebaliknya, jika kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah rendah, partisipasi politik seringkali pasif (*pressure indifference*). Partisipasi radikal terjadi ketika kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan terhadap pemerintah rendah. Jika kesadaran politik rendah tetapi keyakinan agama pada pemerintah tinggi, partisipasi semacam ini disebut tidak aktif (pasif).

Partisipasi politik berdasar frekuensi dan intensitas. Partisipasi politik dapat dikelompokkan menjadi aktivis, partisipan serta pengamat. Tingkat partisipasi politik Piramida Menurut David F. Roth dan Frank I. Wilson (Gatara dan Dzulkiah Said, 2011), yaitu sebagai berikut:



Gambar 2.1 Piramida Partisipasi Politik Budiardjo (2008)

Gambar diatas, piramida aktivis termasuk pejabat partai sepenuh waktu, pemimpin partai, atau pemangku kepentingan, beberapa peserta termasuk pejabat kampanye, anggota aktif partai politik atau kelompok kepentingan, dan berpartisipasi aktif dalam proyek sosial.

Bagian partisipan meliputi petugas pejabat partai sepenuh waktu, pemimpin partai/kelompok kepentingan, petugas kampanye. Bagian pengamat termasuk anggota yang berpartisipasi dalam pertemuan rapat umum anggota partai/kelompok kepentingan, mendiskusikan

dilema politik, update dengan info politik lewat media massa, dan ikut serta pada pemilu.

Kelompok paling akhir dari piramida partisipasi tersebut artinya apolitis. Struktur hierarki piramida partisipasi politik yang ditunjukkan pada gambar dimaksudkan untuk menggambarkan tingkat partisipasi politik dalam kekuasaan dan berlaku untuk semua jenis sistem politik. Definisi tersebut berasal dari berbagai kelas pada gambar diatas, dilihat dari skala kegiatan yang berkaitan dengan politik, kelas yang satu berbeda dengan kelas yang lain. Non-politisi berpartisipasi dalam pertemuan non-profesional, anggota partai politik/kelompok kepentingan, mencoba membujuk orang untuk memilih dalam pemilu, mendiskusikan dilema politik, dan memperhatikan perkembangan politik.

- d. Klasifikasi partisipasi politik pada konvensional serta non konvensional. Gabriel Almond dalam (Cholisin, 2012: 150) menjelaskan partisipasi politik sebagai konvensional serta non-konvensional. Kegiatan politik konvensional merupakan partisipasi politik yang wajar pada demokrasi modern. Wujud non konvensional baik sebagian yang mungkin mirip petisi serta ilegal, mirip perilaku politik yang berisi kekerasan, serta revolusioner. Wujud frekuensi partisipasi politik bisa dipakai sebagai penilaian buat mengukur kestabilan politik, integritas politik, serta tingkat kepuasan masyarakat, meskipun partisipasi politik terdapat beberapa wujud, dalam hal sikap politik serta macam-macam politik dapat dijelaskan sebagai berikut ini: memberikan hak suara pada aktivitas pemilu merupakan wujud partisipasi politik yang biasa, sedikit lebih luas daripada partisipasi politik lain.

Aktivitas partisipasi politik tersebut walaupun hanya berkaitan dengan masalah suara, sejatinya berkaitan dengan macam-macam janji politik pada saat kampanye, berbuat membantu rakyat, mencari dukungan untuk calon, serta aktivitas yang tujuannya memberi

pengaruh pada masyarakat akibat investigasi. Kegiatan pemilu adalah wujud partisipasi politik kolektif yang besar dan menjadi pembeda partisipasi politik lain.

6. Penyebab Timbulnya Gerakan Partisipasi

Kata partisipasi politik cenderung dihubungkan pada dukungan masyarakat untuk menjalankan keputusan yang sudah ditetapkan para pemimpin politik serta pemerintahan. Weiter (dalam Syahril, 2011), ada beberapa hal yang menjadi sebab munculnya aktivitas kearah partisipasi yang lebih besar dalam proses politik, yaitu sebagai berikut:

- a. Semua bidang kehidupan yang semakin maju dan modern menjadikan masyarakat semakin banyak mengajukan tuntutan supaya masuk dalam kekuasaan politik.
- b. Kelas sosial yang strukturnya banyak berubah. Urusan siapa yang memiliki hal dalam berpartisipasi dan penetapan keputusan politik menjadi bagian penting serta berakibat pada perubahan sistem partisipasi politik.
- c. Dampak adanya masyarakat intelektual serta pengetahuan komunikasi massa modern. Ide demokrasi partisipasi sudah meluas ke bangsa-bangsa lain sebelum mereka berbagi modernisasi serta industrialisasi cukup matang.
- d. Konflik antar kelompok politik. Apabila keluar konflik antar elit, akan dicari dukungan masyarakat, terjadi perjuangan kelas menengah melawan kaum aristokrat, sudah menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih warga.

Faktanya, perilaku politik warga negara selalu berkisar dari tidak berpartisipasi sama sekali hingga partisipasi terbatas hingga partisipasi penuh dalam kegiatan politik. Mereka yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan politik sama sekali memiliki sikap apatis. Alasannya mungkin: (1) sikap acuh tak acuh (2) tidak tertarik pada politik (3) kurangnya pemahaman tentang isu-isu politik, atau tidak (pengaruh yang tidak pasti). Ketidakpedulian dapat memiliki makna positif selain menjadi

negatif. McCloskey dalam Arifin (2011) mengemukakan bahwa perilaku orang dusun atau acuh tak acuh membantu memberikan keleluasaan pada sistem politik, karena jika seluruh rakyat negara berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik, justru akan menimbulkan konflik, dan perpecahan.

2.3 Pendidikan Politik

1. Pengertian Pendidikan Politik

Negara penganut sistem demokrasi pendidikan politik merupakan suatu hal yang sangat penting, mengingat setiap lima tahun sekali masyarakat selalu terlibat dalam kegiatan pesta demokrasi. Masyarakat menyalurkan hak politiknya melalui sarana yang disebut pemilihan umum untuk menentukan tokoh yang akan memimpinya. Sarana yang dapat dilakukan dalam rangka mencerdaskan atau mendewasakan warga bangsa dalam berdemokrasi salah satunya adalah melalui pendidikan politik, melalui pendidikan politik tersebut diharapkan masyarakat suatu bangsa dapat memiliki pemahaman tentang demokrasi dan politik yang baik sehingga dapat menyalurkan hak pilihnya secara rasional.

Pendidikan politik ialah merupakan sarana untuk memberikan pemahaman pada warga negara bahwa untuk mengubah realitas politik ke dalam sistem politik yang ideal, ditandai adanya perubahan kebudayaan politik baru, Soeprpto (2014). Definisi lain juga dikemukakan oleh Kartini Kartono dalam Idrus Affandi (2017) bahwa pendidikan politik adalah upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis dengan tujuan membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara moral dalam pencapaian tujuan politik.

Pendidikan politik merupakan upaya-upaya yang dicurahkan oleh lembaga-lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, yang berusaha membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik yang sejalan dengan kultur politik orang-orang yang bergerak di lembaga-

lembaga tersebut pada setiap warga negara, membentuk dan menumbuhkan kesadaran politik dengan segala tingkatannya, sehingga warga negara menjadi sadar dan mampu memperoleh sendiri kesadarannya, membentuk dan menumbuhkan kemampuan partisipasi politik yang ia mampu dan senang berpartisipasi politik secara aktif, serta ikut memecahkan persoalan-persoalan umum masyarakatnya dengan segala bentuk partisipasi yang memungkinkan, sehingga mengantarkan kepada perubahan menuju yang lebih baik. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, didefinisikan bahwa pendidikan politik merupakan sebuah proses pemahaman dan pembelajaran tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik juga diperuntukkan untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat sehingga ia dapat berperan sebagai pelaku dan partisipan kehidupan politik. Diharapkan akan mampu tercapainya stabilitas nasional yang semakin mantap dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional sebagai perwujudan cita-cita proklamasi kemerdekaan.

Penulis dapat menyimpulkan bahwasannya yang dikatakan pendidikan politik adalah upaya pendidikan yang disengaja untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat serta kesadaran sehingga masyarakat mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik. Masyarakat yang telah mendapatkan pendidikan politik diharapkan akan mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik secara dewasa, rasional dan bertanggung jawab.

Setelah memahami beberapa pendapat di atas mengenai bentuk-bentuk dari pendidikan politik maka dapat dikatakan bahwa bentuk-bentuk dari pendidikan politik sangat bervariasi. Salah satu bentuk dari pendidikan politik diantaranya melalui berupa sosialisasi yang kegiatan ini dapat dilakukan oleh partai politik, lembaga pendidikan, pemerintah maupun tokoh masyarakat. Bentuk pendidikan politik selain melalui sosialisasi juga dapat dilakukan melalui media massa dan juga pendidikan formal maupun non-formal.

2. Bentuk-Bentuk Pendidikan Politik

Pelaksanaan pendidikan politik akan berkaitan dengan bentuk pendidikan politik yang akan diterapkan pada lapisan masyarakat. Usaha dari keberhasilan pendidikan politik tidak akan dapat terwujud jika tidak diimbangi dengan usaha yang nyata di lapangan. Bentuk pendidikan politik yang dipilih dapat menentukan keberhasilan dari adanya penyelenggaraan pendidikan politik ini.

M. Arifin Nasution (2012) bentuk pendidikan politik yang paling banyak digunakan adalah dengan cara mensosialisasikan materi pendidikan dan visi misi partai mengingat partai politik juga mengemban tugas memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Pendapat di atas mengenai bentuk-bentuk dari pendidikan politik, maka dapat dikatakan bahwa bentuk-bentuk dari pendidikan politik sangat bervariasi, salah satu bentuk dari pendidikan politik diantaranya melalui berupa sosialisasi yang kegiatan ini dapat dilakukan oleh partai politik, lembaga pendidikan, pemerintah maupun tokoh masyarakat. Bentuk pendidikan politik selain melalui sosialisasi juga dapat dilakukan melalui media massa dan juga pendidikan formal maupun non-formal.

3. Tujuan Pendidikan Politik

Setiap kita melakukan kegiatan pasti kita memiliki tujuan yang hendak dicapai, seperti halnya pendidikan politik juga mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan pendidikan politik menurut Siti Khanifah (2015) pada dasarnya adalah untuk mendidik dan mengatur diri sendiri untuk dapat berproses menjadi manusia dewasa dalam mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu demi mencapai tujuan-tujuan politik dan telah memikirkan resiko yang akan didapat dari apa yang telah dilakukan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 pasal 31 tentang partai politik menyebutkan bahwa terdapat tiga orientasi atau tujuan pendidikan

politik, yaitu pertama, meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kedua, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketiga, meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Berdasarkan definisi dari tujuan pendidikan politik diatas maka setidaknya dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan politik antara lain adalah mendidik atau mengatur seseorang atau sekelompok orang agar sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga bangsa yang baik. Selain sadar hak dan kewajiban melalui pendidikan politik seseorang diharapkan juga dapat meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa.

2.4 Pemilihan Kepala Desa

1. Pengertian Pilkades

Pemilihan kepala desa merupakan pemilihan yang bertujuan untuk memilih calon kepala desa yang bersaing dalam pemilihan kepala desa untuk dapat memimpin desa. Pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa yang terdaftar dengan memilih langsung calon kepala desa yang dianggap oleh masyarakat mampu membawa aspirasi masyarakat dan pembangunan desanya (Januari, 2013).

Pemilihan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 34 ayat 1 dan 2, yakni:

- a. Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa. Keberhasilan pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak terlepas dari adanya partisipasi aktif anggota masyarakatnya. Masyarakat desa, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan desa. Secara prinsip, pelaksanaan pemilihan kepala desa ditujukan guna mewujudkan kedaulatan rakyat di desa yang bersangkutan. Keadaan tersebut menimbulkan tanggung jawab penyelenggaraan

pemerintahan desa tidak saja di tangan kepala desa, BPD dan aparat pelaksanaannya, tetapi juga di tangan masyarakat desa tersebut, salah satu wujud dari rasa tanggung jawab masyarakat di atas adalah adanya sikap mendukung terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang antara lain ditunjukkan melalui partisipasi aktif anggota masyarakat dalam memilih kepala desa.

- b. Pemilihan kepala desa bersifat, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil Menurut Dede Mariana kepala desa dipilih berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia oleh penduduk desa warga Negara Indonesia yang telah berumur sekurang-kurangnya 17 tahun atau telah/pernah kawin. Dalam rangka pemilihan kepala desa yang dimaksud dengan asas langsung, umum, bebas dan rahasia adalah sebagai berikut:
- 1) Asas langsung berarti pemilih mempunyai hak suara langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya tanpa perantara.
 - 2) Asas umum berarti bahwa pada dasarnya semua penduduk desa WNI yang memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya telah berusia 17 tahun ataupun telah/pernah kawin berhak memilih dalam pemilihan kepala desa. Pemilihan bersifat umum berarti pemilihan yang berlaku menyeluruh bagi semua penduduk desa warga Negara Indonesia menurut persyaratan tertentu tersebut diatas.
 - 3) Asas bebas berarti pemilih dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk menetapkan pilihannya sendiri tanpa adanya pengaruh tekanan dari siapapun dan dengan apapun.
 - 4) Asas rahasia berarti pemilih dijamin oleh peraturan perundang-undangan bahwa suara yang diberikan dalam pemilihan tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan jalan apapun.
 - 5) Asas jujur adalah dalam penyelenggaraan pemilihan umum, penyelenggara, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan

bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- 6) Asas adil yang dimaksud adalah dalam penyelenggaraan pemilihan umum, setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

2. Kampanye Calon Kepala Desa

Pasal 38 mengatur tentang kampanye calon kepala desa sebagai berikut: calon kepala desa mengkampanyekan program kerjanya kepada masyarakat dan pelaksanaannya diatur oleh panitia pemilihan. Panitia pemilihan menetapkan tempat, mekanisme, sistem dan waktu pelaksanaan kampanye serta masa kampanye dan melaporkannya kepada BPD. Satu minggu sebelum pelaksanaan pemungutan suara, masing-masing calon kepala desa dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun. Apabila ada calon kepala desa yang terbukti melakukan kampanye seminggu sebelum pemungutan suara, maka calon kepala desa tersebut dinyatakan gugur oleh panitia pemilihan.

Pasal 39 mengatur tentang tata cara kampanye sebagai berikut:

Kampanye dilaksanakan secara dialogis melalui rapat umum dan selebaran oleh calon yang bersangkutan, pada saat kampanye dilarang:

- a. Mempersoalkan dasar negara, Pancasila, pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain.
- d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat.
- e. Mengganggu ketertiban umum.

- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain.
- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon.
- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.
- i. Membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan.
- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

3. Tahap-Tahap Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa

Tahapan pemilihan kepala desa berdasarkan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pilkades. Ada beberapa tahapan dalam proses pemilihan kepala desa berdasarkan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan kepala desa:

- a. Persiapan
- b. Pencalonan
- c. Pemungutan suara
- d. Penetapan (permendagri, 2014)

Selanjutnya tahapan pemilihan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berikut ini adalah tahapan dalam proses pemilihan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat dalam Pasal 31 sampai Pasal 39 menjelaskan bahwa kepala desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan yang berlaku sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, masa jabatan seorang kepala desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Proses pilkades dalam Undang-Undang ini dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seperti yang

disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 32. Sebagai wujud tanggung jawab BPD dalam melaksanakan pemilihan, maka dibentuklah panitia pemilihan, dimana anggota panitia pemilihan tersebut merupakan wakil dari perangkat desa, lembaga masyarakat desa dan juga tokoh masyarakat.

Salah satu tugas panitia pemilihan kepala desa adalah mensosialisasikan pemilihan kepala desa kepada masyarakat, menjaring bakal calon, melakukan seleksi bakal calon dan sebagainya. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Pasal 33 disebutkan bahwa yang menjadi syarat pencalonan kepala desa adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan YME;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara

- jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. Berbadan sehat;
 - l. Tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - m. Syarat lain yang diatur dalam peraturan daerah.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam undang-undang ini dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah kabupaten/kota, dengan maksud untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya (Rudiadi dan Herawati. 2016).

2.5 Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang nomor 28 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung (berita daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019 Nomor 28), diubah sebagai berikut:

Ketentuan pasal 3 ayat (3) diubah, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan satu ayat yakni ayat (3a), di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan satu ayat yakni ayat (4a) sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Panitia pemilihan kabupaten dibentuk oleh bupati dan ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (2) Panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan perangkat daerah dan instansi terkait.
- (3) Panitia pemilihan yang di maksud ayat (2) terdiri atas unsur :
 - a. Forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda);
 - b. Unsur sekretariat daerah;

- c. Unsur pengawasan;
 - d. Unsur perencanaan;
 - e. Unsur pemberdayaan masyarakat;
 - f. Unsur politik dan pemerintahan umum;
 - g. Unsur administrasi kependudukan;
 - h. Unsur kesehatan;
 - i. Unsur penanggulangan bencana daerah;
 - j. Unsur bidang keuangan;
 - k. Unsur pendidikan;
 - l. Unsur ketentraman dan ketertiban
 - m. Unsur kecamatan.
- (4) Panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala kampung terhadap panitia pemilihan kepala kampung tingkat kampung;
 - c. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. Menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan kampung;
 - f. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pemilihan kepala kampung tingkat kabupaten;
 - g. Melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala kampung dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati;
 - h. Melaksanakan tes tertulis terhadap bakal calon kepala kampung yang jumlah pendaftarnya lebih dari 5 (lima) bakal calon;
 - i. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 4

- (1) Panitia pemilihan kampung dibentuk oleh bpk dan ditetapkan dengan keputusan bpk paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan kepala kampung.
- (2) Bagi kampung yang dijabat oleh penjabat kepala kampung, pembentukan panitia pemilihan kampung serentak dilaksanakan setelah ditetapkannya jadwal pemilihan kepala kampung serentak paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah ditetapkannya jadwal pemilihan kepala kampung serentak oleh bupati.
- (3) Panitia pemilihan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat kampung, pengurus lembaga kemasyarakatan kampung dan tokoh masyarakat kampung.
- (4) Panitia pemilihan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Ketua
 - b. Sekertaris
 - c. Bendahara
 - d. Anggota
- (5) Jumlah panitia pemilihan kampung sebagaimana dimaksud ayat (4) berjumlah 15 orang.
- (6) Panitia pemilihan kampung dikukuhkan oleh pimpinan BPK paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dan disaksikan oleh camat atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Dalam hal panitia pemilihan kampung mengundurkan diri atau berhalangan tetap dan atau diberhentikan, maka BPK melaksanakan rapat untuk menetapkan penggantinya dari unsur yang sama.
- (8) Keputusan BPK tentang panitia pemilihan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh BPK kepada bupati melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (9) Panitia pemilihan kampung melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya calon kepala kampung terpilih.

- (10) Sekretariat panitia pemilihan kampung berada di kantor kepala kampung atau balai kampung.
- (11) Bagi kampung yang tidak mempunyai kantor atau balai kampung, maka sekretariat panitia ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah panitia dan dilaporkan kepada camat.

Pasal 5

- (1) Panitia pemilihan kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mempunyai tugas:
- a. Merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada bupati melalui camat;
 - c. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. Memeriksa kelengkapan berkas bakal calon;
 - f. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - g. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - h. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - i. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - j. Melaksanakan pemungutan suara;
 - k. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan
 - l. Mengumumkan hasil pemilihan;
 - m. Menetapkan calon kepala kampung terpilih; dan
 - n. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kampung berwenang:
- a. Menetapkan lokasi TPS;
 - b. Menetapkan DPS, DPT;
 - c. Menetapkan bakal calon;

- d. Menetapkan calon kepala kampung;
- e. Menggugurkan bakal calon kepala kampung untuk mengikuti tahap berikutnya jika terbukti melakukan pelanggaran dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai calon kepala kampung.

Pasal 8

- (1) Lokasi dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan kampung.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berjumlah 1 (satu) TPS
- (3) Dalam menentukan lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia pemilihan kampung harus mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
 - a. Berada di kampung setempat;
 - b. Tempat yang netral, mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas;
 - c. Menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
 - d. Lokasi TPS ditentukan melalui musyawarah panitia pemilihan kampung dapat dihadiri kepala kampung/penjabat kepala kampung dan pimpinan BPK serta perwakilan kecamatan
- (4) Dalam menentukan jumlah dan tata letak TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kriteria sebagai berikut:
 - a. Jumlah bilik suara berjumlah 3 pada setiap TPS
 - b. Pada setiap TPS terdapat 1 kotak suara.

2.6 Kajian Penelitian Relevan

Adapun kajian penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan yaitu sebagai berikut:

- 1. Penelitian yang dilakukan oleh Falua Jisokhi Haluana'a, Irwan Nasution dan Beby Masitoh Batubara 2020 dengan judul Analisis

Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Orahili Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan, hasil penelitian menjelaskan tingkat partisipasi masyarakat di Desa Orahili sangat tinggi partisipasinya akan mengikuti kegiatan pemilihan kepala desa. Disimpulkan bahwa yang pertama tingkat kesadaran masyarakat mulai tumbuh dan yang kedua masyarakat mencari sosok pemimpin yang berpengalaman dibidang pemerintahan, mau mengayomi dan melayani masyarakat tanpa batas. Persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan persamaannya terletak pada partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih difokuskan kepada kesadaran dan partisipasi politik masyarakat dalam memilih kepala desa.

2. Ahmad Averus, Dinda Alfina, 2020 dengan judul Partisipasi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat di Desa Pengasih dipengaruhi oleh dua aspek penting yaitu kesadaran politik masyarakat dan keyakinan politik masyarakat. Kesadaran politik masyarakat Desa Pengasih cenderung dipengaruhi letak wilayah sebab Desa Pengasih memiliki dua wilayah yang berbeda yaitu wilayah yang masih termasuk pedesaan dan wilayah yang sudah memasuki perkotaan. Masyarakat Desa Pengasih yang berada di wilayah pedesaan memiliki kesadaran politik yang rendah dibanding masyarakat Desa Pengasih yang masuk wilayah perkotaan., sedangkan keyakinan politik terhadap pemerintah Desa Pengasih terbagi menjadi dua yaitu kepercayaan terhadap pemimpin dan anggapan masyarakat terhadap sistem politik. Hal lain yang berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik masyarakat seperti kemauan politik, tingkat pendidikan, dan tingkat ekonomi. Penelitian yang dilakukan hanya mengetahui partisipasi politik, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih difokuskan kepada kesadaran dan partisipasi politik masyarakat dalam memilih kepala desa.

3. Mery Anggraini, Asrinaldi, dan Aidinil Zetra 2015 dengan judul Pengaruh kesadaran dan kepercayaan politik terhadap partisipasi politik Masyarakat Dharmasraya pada pilkada 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran politik dan kepercayaan terhadap sistem pemerintahan masyarakat Kabupaten Dharmasraya cukup tinggi. Kesadaran politik dan kepercayaan terhadap sistem pemerintahan memiliki hubungan positif dengan partisipasi politik masyarakat pada pilkada serentak di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015. Penelitian yang telah dilakukan diketahui memiliki hubungan positif antara kesadaran politik dan kepercayaan terhadap sistem pemerintahan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih difokuskan kepada kesadaran dan partisipasi politik masyarakat dalam memilih kepala desa.
4. RR Emilia Yustiningrum dan Wawan Ichwanuddin, 2015 dengan judul penelitian Partisipasi Politik dan Perilaku Memilih pada Pemilu 2014. Hasil penelitian perilaku pemilih berkaitan dengan pilihan rasional menjelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan ekonomi adalah isu yang strategis bagi mayoritas pemilih, untuk membangun kedekatan dengan pemilih, pemenuhan kebutuhan ekonomi akan menjadi kompetisi antar para kandidat anggota legislatif maupun antar partai politik sendiri. Penelitian yang dilakukan menemukan pemenuhan kebutuhan ekonomi menjadi isu strategis bagi mayoritas pemilih, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih difokuskan kepada kesadaran dan partisipasi politik masyarakat dalam memilih kepala desa.

2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat pengaruh kesadaran politik (variabel independen atau X) terhadap partisipasi politik (variabel dependen atau Y) pada pemilihan kepala desa di Kampung Bakung Udik, Kabupaten Tulang Bawang.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kesadaran politik mengacu pada tiga pola kesadaran politik menurut Gabriel Almond dan Verba, yaitu:

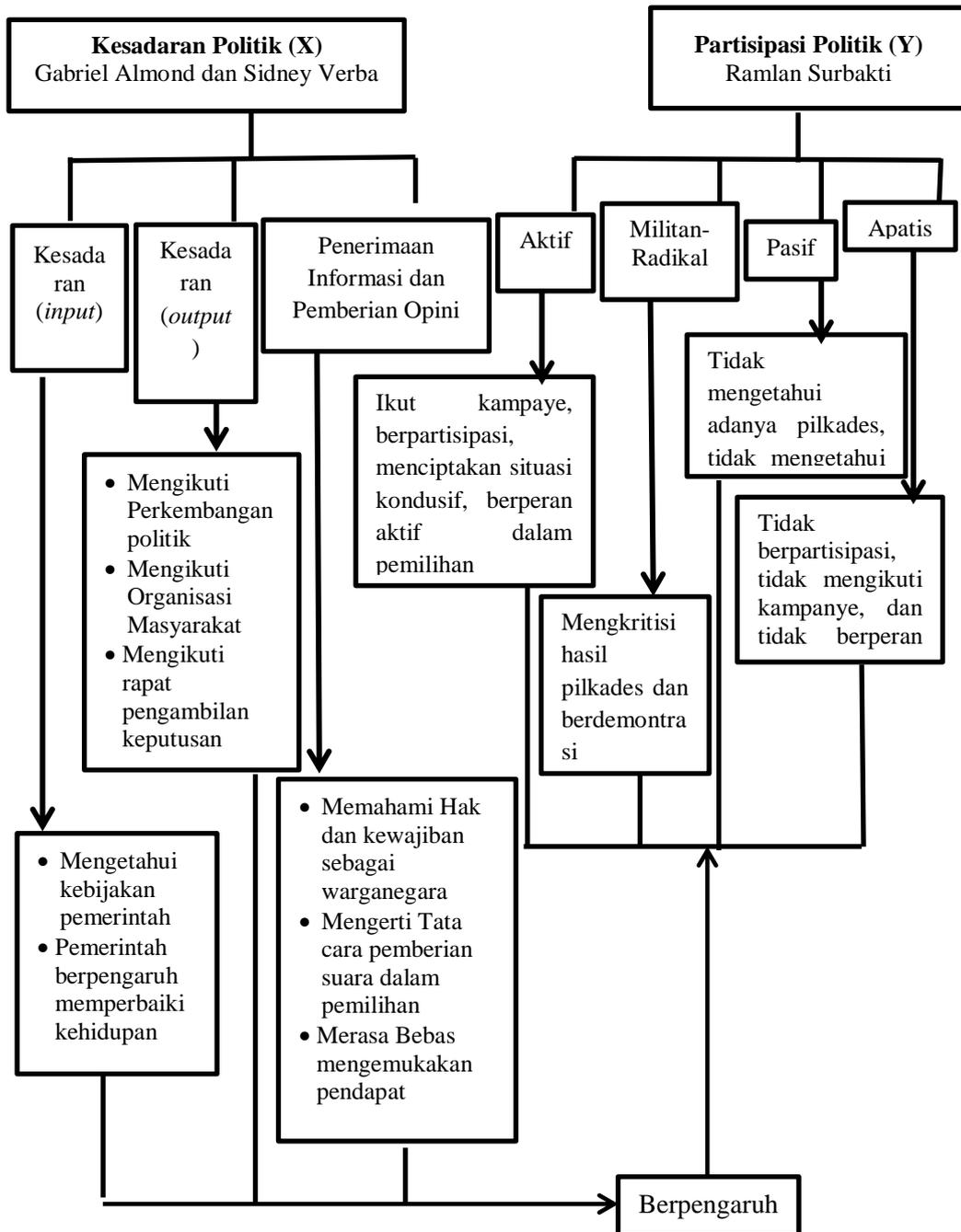
1. Kesadaran output. Ketertarikan masyarakat dengan perkembangan politik pemerintahan, mengikuti organisasi masyarakat dan ikut rapat pengambilan keputusan.
2. Kesadaran input, penilaian masyarakat terkait kebijakan pemerintah.
3. Penerimaan informasi dan pemberian opini. Mengetahui kandidat calon kepala desa, mengetahui tata cara memberikan suara dalam pemilihan, serta bebas untuk mengemukakan pendapatnya.

Indikator yang digunakan untuk mengukur partisipasi politik mengacu pada bentuk-bentuk partisipasi politik menurut Surbakti.

Adapun rincian bentuk partisipasi politik aktif, militan-radikal, pasif, dan apatis, sebagai berikut:

- 1) Aktif
 - a. Ikut kampanye
 - b. Menciptakan situasi kondusif
 - c. Berperan aktif dalam pemilihan
- 2) Militan-radikal
 - a. Mengkritisi hasil pemilihan
 - b. Berdemonstrasi
- 3) Pasif
 - a. Tidak mengetahui adanya pemilihan kepala desa
 - b. Tidak mengetahui kandidat calon kepala desa
- 4) Apatis
 - a) Tidak berpartisipasi dalam pilkades
 - b) Tidak mengikuti kampanye
 - c) Tidak berperan aktif dalam pilkades

Peta konsep pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:



Gambar 2.2 bagan Kerangka Berpikir

2.8 Hipotesis

Adapun hipotesis pada penelitian ini, yaitu:

- H_0 : Tidak ada pengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi politik masyarakat Kampung Bakung Udik, Kabupaten Tulang Bawang dalam memilih kepala desa.
- H_1 : Terdapat pengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi politik masyarakat Kampung Bakung Udik, Kabupaten Tulang Bawang dalam memilih kepala desa.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini juga menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 25 dan Microsoft Exel 2010. Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk mendeskripsikan dan menjelaskan hubungan satu variabel dengan variabel lainnya dengan angka. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menafsirkan data yang ada misalnya situasi yang dialami, suatu hubungan kegiatan, pandangan, pengaruh yang sedang nampak, pertentangan yang sedang meruncing, dan lain sebagainya (Arikunto, 2006). Sesuai dengan definisi diatas, maka penggunaan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif ini sangat cocok untuk penelitian penulis.

3.2 Populasi dan Sampel

1. Populasi Penelitian

(Sugiyono, 2015) mengungkapkan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang dinilai mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu sehingga penting untuk ditetapkan oleh penulis dalam mempelajari kemudian dan menyimpulkannya. Populasi dalam penulisan digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari suatu wilayah yang menjadi sasaran penulisan (Noor, 2011).

Berikut daftar populasi masyarakat di Kampung Bakung Udik,
Kabupaten Tulang Bawang:

Tabel 3.1 Populasi Masyarakat Kampung Bakung Udik

No	RT	Nama Ketua RT	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Individu	Jumlah pemilih berusia 17 tahun
1	01 RW 01	M. Kemis	40	146	109
2	02 RW 01	Musdam	52	165	118
3	01 RW 02	Haidar	41	143	113
4	02 RW 02	Musa	48	186	120
5	01 RW 03	Mat Hedar	93	304	251
6	02 RW 03	Angga S	74	250	224
7	01 RW 04	Haryanto	63	238	188
8	02 RW 04	Aripin	60	248	152
Jumlah			471	1680	1275

Sumber: dokumen demografi Kampung Bakung Udik tahun 2022

Berdasarkan tabel 3.1 jumlah RT yang ada di Kampung Bakung Udik berjumlah 8 RT dengan 471 kepala keluarga dan 1680 penduduk. Populasi penelitian yang memenuhi kriteria dalam memilih kepala desa berjumlah 1.275 penduduk di Kampung Bakung Udik, Kabupaten Tulang Bawang.

2. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan penulis tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang

dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Sampel yang diambil harus betul-betul mewakili atau representatif (Sugiyono, 2015).

Arikunto (2010) Sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang diteliti). Apabila populasi penelitian berjumlah kurang dari 100 maka sampel yang diambil adalah semuanya, namun apabila populasi penelitian berjumlah lebih dari 100 maka sampel dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% lebih. Berdasarkan jumlah populasi sebesar 996 maka sampel penelitian ini ialah:

$$n = \frac{N}{N(d^2)+1}$$

Keterangan :

n : Jumlah Sampel

N : Jumlah Populasi

d^2 : Presisi atau batas toleransi kesalahan pengambilan sampel.

Adapun hasil sampel yang dilakukan dengan menggunakan teknik random sampling, berdasarkan jumlah sampel dengan persentase 10% yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N(d^2) + 1} = \frac{1275}{1275(0,1^2) + 1} = \frac{1275}{13,75} = 92,72 = 93$$

Berdasarkan pada perhitungan di atas, maka jumlah sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah 93 masyarakat. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik Sampel Random atau sampel acak, sehingga penulis memberi hak yang sama kepada setiap masyarakat untuk memperoleh kesempatan (*chance*) dipilih menjadi sampel. Penentuan sampel penelitian dilakukan dengan melihat daftar masyarakat yang memiliki hak pilih dalam pemilu kepala desa di Kampung Bakung Udik pada tahun 2022.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat rinciannya sebagai berikut:

Tabel 3.2 Sampel penelitian

No	RT	Jumlah	Perhitungan Sampel	Jumlah Sampel
1	01 RW 01	79	$\frac{109}{1275} \times 93 = 7,95$	8
2	02 RW 01	96	$\frac{118}{1275} \times 93 = 8,60$	9
3	01 RW 02	98	$\frac{113}{1275} \times 93 = 8,24$	8
4	02 RW 02	103	$\frac{120}{1275} \times 93 = 8,75$	9
5	01 RW 03	152	$\frac{251}{1275} \times 93 = 18,30$	18
6	02 RW 03	174	$\frac{224}{1275} \times 93 = 16,33$	16
7	01 RW 04	142	$\frac{188}{1275} \times 93 = 13,71$	14
8	02 RW 04	152	$\frac{152}{1275} \times 93 = 11,08$	11
Jumlah				93

Sumber: Data Kampung Bakung Udik tahun 2022

Berdasarkan tabel 3.2 perhitungan sampel diketahui jumlah sampel yang akan digunakan pada penelitian ini berjumlah 93 penduduk yang memenuhi kriteria pemilih.

3.3 Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2009) variabel adalah sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara suatu orang dengan yang lain atau satu objek lain. Variabel disebut sebagai sebuah konsep yang masih umum dalam penelitian diubah menjadi variabel.

Adapun variabel dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Variabel bebas (simbol X)

Adapun variabel bebas dalam penelitian ini ialah kesadaran politik (X). Variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen.

2. Variabel terikat (simbol Y)

Variabel terikat dalam penelitian ini ialah partisipasi politik. Menurut Sugiyono (2016) variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena keberadaan variabel independen (bebas).

3.4 Definisi Konseptual dan Operasional

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual variabel digunakan untuk menegaskan tentang masalah yang akan diteliti. Definisi konseptual merupakan penegasan serta penjelasan suatu konsep dengan menggunakan konsep atau kata-kata kembali, yang tidak diharuskan untuk menunjukkan dimensi pengukuran tanpa menunjukkan deskripsi, indikator, dan tentang bagaimana cara mengukurnya. Beberapa aspek yang perlu dikonsepsikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kesadaran Politik (X)

Kesadaran politik merupakan perasaan bahwa dirinya diperintah dan percaya bahwa mereka dapat sedikit banyak memengaruhi pemegang kekuasaan atau percaya bahwa mereka memiliki efek politik (Ramlan Surbakti, 2013).

b. Partisipasi Politik (Y)

Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama (Inu kencana Syafie, 2015).

2. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat nilai dari objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015).

Penulis menggunakan definisi operasional variabel agar menjadi petunjuk dalam penelitian ini. Definisi operasional yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Kesadaran politik terhadap partisipasi politik, sehingga hasil penilaian ini akan memberikan pengaruh baik buruk. Berkaitan dengan kesadaran politik masyarakat, maka dapat dijabarkan indikatornya sebagai berikut:
 1. Kesadaran output
Kesadaran input meliputi tertarik mengikuti perkembangan politik, mengikuti organisasi masyarakat, mengikuti rapat dalam pengambilan keputusan.
 2. Kesadaran input
Kesadaran output meliputi mengetahui kebijakan pemerintah, dan merasa pemerintah berpengaruh dan memperbaiki kehidupan.
 3. Penerimaan informasi dan pemberian opini
Penerimaan informasi dan pemberian opini meliputi memahami hak dan kewajiban sebagai warganegara, mengerti tata cara pemberian suara dalam pemilihan, mengenal nama calon kepala desa, merasa bebas mengemukakan pendapat.
- b. Partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa. Berkaitan dengan partisipasi politik masyarakat, maka dapat dijabarkan indikatornya sebagai berikut:
 1. Aktif
Ikut kampanye, menciptakan situasi kondusif, berperan aktif dalam pemilihan

2. Militan-radikal
Mengkritisi hasil pemilihan, berdemonstrasi
3. Pasif
Tidak mengetahui adanya pemilihan kepala desa, tidak mengetahui kandidat calon kepala desa
4. Apatis
Tidak berpartisipasi dalam pilkades, tidak mengikuti kampanye, tidak berperan aktif dalam pilkades

3.5 Rencana Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik skoring pada alternatif jawaban dalam lembaran angket yang disebarakan kepada responden dengan indikator-indikator pada variabel penelitian di Kampung Bakung Udik, Kabupaten Tulang Bawang.

Kriteria rincian pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah:

- a. Berpengaruh
Kesadaran politik dinyatakan berpengaruh terhadap partisipasi politik apabila masyarakat mampu menunjukkan kesadaran berpolitik dengan berpartisipasi menggunakan hak pilihnya.
- b. Cukup berpengaruh
Kesadaran politik dinyatakan berpengaruh terhadap partisipasi politik apabila masyarakat mampu menunjukkan kesadaran berpolitik dengan berpartisipasi menggunakan hak pilihnya dengan baik namun belum sepenuhnya.
- c. Kurang berpengaruh
Kesadaran politik dinyatakan tidak berpengaruh apabila masyarakat tidak mampu berpartisipasi politik dengan baik.

Mengenai pengukuran variabel, dilakukan dengan menggunakan indikator indikator berupa pertanyaan pilihan ganda. Setiap butir atau item soal memiliki tiga kemungkinan jawaban dari kode (a), (b), dan (c). Responden cukup memilih alternatif jawaban yang tersedia. Setiap jawaban memiliki skor yang berbeda, (a) dengan skor 3, (b) dengan skor 2, dan (c) dengan skor 1.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pada hakikatnya data merupakan sebuah hasil pencatatan penulis, baik yang berupa fakta ataupun angka (Arikunto, 2019). Oleh karenanya, teknik pengumpulan data merupakan sebuah cara yang digunakan untuk memperoleh pencatatan dalam segala informasi berupa fakta dan angka atau hal-hal sebagian atau ukuran keseluruhan mengenai suatu variabel atau seluruh populasi secara lengkap sehingga harapannya dapat menjadi pendukung keberhasilan dalam sebuah penelitian. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu teknik pokok dan teknik pendukung.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

1. Angket

(Fathoni, 2011) memaparkan bahwasannya angket merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner (daftar pertanyaan/isian) untuk kemudian diisi langsung oleh responden seperti yang dilakukan dalam penelitian untuk menghimpun sebuah informasi data. Penelitian ini menggunakan teknik angket sebagai teknik pokok untuk mengumpulkan data berupa pernyataan tertulis yang diberikan kepada responden mengenai pengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi politik pada pemilihan kepala desa di Kampung Bakung Udik, Kabupaten Tulang Bawang.

Teknik angket ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi langsung dari responden, sasaran dalam penelitian ini menggunakan

angket tertutup sehingga responden mendapatkan jawaban. Sasaran responden adalah masyarakat Kampung Bakung Udik Kabupaten Tulang Bawang. dalam penelitian ini menggunakan angket tertutup sehingga responden dapat menjawab dengan tiga alternatif jawaban (Setuju, Kurang Setuju dan Tidak Setuju), kemudian selanjutnya responden akan memilih salah satu jawaban dengan memberikan tanda *checkbox* pada jawaban yang telah dipilih serta jawaban yang diberikan memiliki bobot nilai bervariasi. Variasi nilai atau skor dari masing-masing jawaban dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Untuk jawaban yang sesuai dengan harapan akan diberikan skor atau nilai tiga (3).
- b. Untuk jawaban yang kurang sesuai dengan harapan akan diberikan skor atau nilai dua (2).
- c. Untuk jawaban yang tidak sesuai dengan harapan maka akan diberikan skor atau nilai satu (1).

Berdasarkan keterangan di atas, maka nantinya akan diketahui nilai tertinggi adalah skor atau nilai tiga (3) sedangkan nilai terendahnya adalah mendapatkan nilai atau skor satu (1).

2. Teknik Pendukung

a. Wawancara

Pada hakikatnya wawancara merupakan sebuah cara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penulis berkeinginan untuk melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang diteliti (Sugiyono, 2015). Wawancara merupakan sebuah proses pengajuan pertanyaan yang diajukan kepada narasumber guna mengumpulkan data yang mendukung untuk penulis dalam melakukan kegiatan penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data sekunder yang berupa keterangan-keterangan, catatan-catatan, laporan dan

sebagainya yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Berkaitan dengan penelitian ini dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan dan melengkapi data-data terkait dengan pengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi politik pada pemilihan kepala desa di Kampung Bakung Udik Kabupaten Tulang Bawang.

3.7 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

1. Uji Validitas

Suharsimi Arikunto (2010) bahwa sebuah instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Sugiyono menyatakan bahwa instrumen dikatakan valid berarti menunjukkan alat ukur yang dipergunakan untuk mendapatkan data itu valid atau dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Maka dapat diketahui bahwa, uji validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Semakin tinggi validitas dari sebuah instrumen maka instrumen tersebut valid, namun sebaliknya semakin rendah validitas dari sebuah instrumen maka nilai dari sebuah instrumen kurang valid atau memiliki validitas rendah.

Disimpulkan jika uji validitas instrumen dapat digunakan untuk menghitung sejauh mana alat ukur yang dipakai bisa mengukur apa yang dapat diungkapkan dan apa yang diinginkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Metode uji validitas angket yang diterapkan dalam penelitian ini adalah korelasi *Product Moment* dengan rumus:

$$r_{xy} = \frac{\sum xy - \frac{(\sum x)(\sum y)}{N}}{\sqrt{\left\{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{N}\right\}\left\{\sum y^2 - \frac{(\sum y)^2}{N}\right\}}}$$

(Sujarweni, 2012)

Keterangan:

r_{xy} = Koefesien korelasi *pearson* validitas

x = Skor tanggapan responden atas setiap pertanyaan

y = Skor tanggapan responden atas seluruh pertanyaan

n = Banyaknya jumlah/subyek

Setelah mengetahui hasil dari rumus *pearson product moment*, kemudian penulis juga melakukan pengujian kembali angket menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05 dengan kriteria pengambilan keputusan yaitu jika $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ maka instrumenn dinyatakan valid. Untuk memudahkan uji coba dalam penelitian ini maka dilakukan dengan menggunakan bantuan program *Statistical Product and Service Solution* (SPSS). Adapun kriteria diterima atau tidaknya suatu data valid atau tidak dalam program SPSS (Prayitno, 2012).

Berdasarkan nilai korelasi :

- a. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka item dinyatakan valid.
- b. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka item dinyatakan tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

Menurut Suharsimi Arikunto (2010) menjelaskan bahwasanya reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwasannya suatu instrumen cukup serta dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut telah baik. Jika nilai *Cronbach's Alpha* instrumen lebih besar dari 0,6 maka instrumen tersebut dianggap tidak reliabel.

Kekonsistenan responden dalam menjawab kuesioner dari waktu ke waktu akan membuktikan hasil dari kuesioner terkait kredibel.

Reliabilitas mengacu pada tingkat konsistensi, prediktabilitas, konsistensi, akurasi, dan stabilitas.

3.8 Teknik Analisis Data

1. Analisis Distribusi Frekuensi

Analisis data frekuensi dilakukan terhadap hasil pengambilan data dari angket kesadaran dan partisipasi politik pada pemilihan kepala desa di Bakung Udik Kabupaten Tulang Bawang. Analisis distribusi frekuensi menggunakan rumus interval dengan persamaan sebagai berikut:

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

Keterangan:

I : Interval

NT : Nilai Tertinggi

NR : Nilai Terendah

K : Kategori

Kemudian untuk mengetahui tingkat persentase digunakan rumus persentase yaitu sebagai berikut:

$$P = \frac{FN}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P : Besarnya Persentase

F : Jumlah skor yang diperoleh di seluruh item

N : Jumlah Perkalian seluruh item dengan responden

Setelah angka persentase didapat maka dimasukkan kedalam kriteria yang telah ditentukan menurut (Arikunto, 2019) yaitu sebagai berikut:

76% - 100% = Baik

56% - 75% = Cukup

40% - 55% = Kurang baik

0% - 39% = Tidak baik

2. Uji PraSyarat Analisis

Uji prasyarat analisis ini dilakukan dengan alasan karena pengerjaan analisisnya menggunakan statistik parametris, maka harus dilakukan pengujian persyaratan analisis terhadap asumsi dasar seperti uji normalitas dan linearitas untuk uji korelasi dan regresi. Pada penelitian ini menggunakan uji prasyarat normalitas dan linearitas karena analisis akhir dari penelitian ini adalah analisis korelasi dan analisis regresi linear sederhana.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah suatu percobaan untuk mengetahui apakah data sampel berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas menggunakan SPSS 20 untuk memperoleh koefisiennya. Dalam penelitian ini dilakukan dengan uji *Kolmogorov Smirnov*, karena sampel yang digunakan merupakan mempunyai skala yang besar ≥ 50 . Berikut ini rumus uji *Kolmogorov smirnov* :

$$D = |F_s(x) - F_t(x)| \max$$

Keterangan:

$F_s(X)$ = Distribusi Frekuensi Sampel

$F_t(X)$ = Distribusi Frekuensi Teoritis

Pedoman dalam pengambilan hasil akhir menggunakan uji kolmogorov adalah:

- a) jika nilai signifikansi (Sig) atau probabilitas (p) $\geq 0,05$, maka data penelitian berdistribusi normal.
- b) jika nilai signifikansi (Sig) atau probabilitas (p) $\leq 0,05$, maka data penelitian berdistribusi tidak normal.

Hal ini dilakukan untuk menentukan data statistik yang digunakan. Jika data berdistribusi normal dapat digunakan metode statistik parametrik, sedangkan jika data tidak berdistribusi tidak normal maka dapat menggunakan metode non parametrik (Sugiyono, 2015).

b. Uji Linieritas

(Sugiyono, 2015) uji linearitas dapat dipakai untuk mengetahui apakah variabel terikat dengan variabel bebas memiliki hubungan linear atau tidak secara signifikan. Uji linearitas dapat dilakukan melalui *test of linearity*. Kriteria yang berlaku adalah:

- a) jika nilai signifikansi pada linearity $\geq 0,05$, maka dapat diartikan bahwa antara variabel bebas dan variabel terikat terdapat hubungan yang linear.
- b) jika nilai signifikansi pada linearity $\leq 0,05$, maka dapat diartikan bahwa antara variabel bebas dan variabel terikat tidak ada hubungan yang linear.

3. Analisis Data

a. Uji Regresi

Selanjutnya dalam penelitian ini akan diujikan menggunakan rumus regresi linier. Untuk mempermudah dalam uji linieritas maka pada penelitian ini menggunakan daftar analisis varian (anova) dengan ketentuan apabila $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ pada taraf 5% dengan dk pembilang $(k-2)$ dan dk penyebut $(n-k)$, maka regresi linier. Data hasil dari analisis regresi ini digunakan untuk melihat pengaruh antara kesadaran dan partisipasi politik. Adapun persamaan dari regresi linier adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2019):

$$Y = a + b X$$

Keterangan:

Y = Subjek variabel terikat yang diprediksikan

X = Variabel bebas yang mempunyai nilai tertentu

A = Y bila X = 0

b = Nilai arah atau nilai koefisien regresi

b. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh positif antara kesadaran politik dan partisipasi politik pada pemilihan kepala kampung di Bakung Udik Kabupaten Tulang Bawang.

Uji hipotesis dilakukan menggunakan SPSS versi 25 berdasarkan hasil uji analisis regresi linier sederhana untuk memperoleh koefisien signifikannya. Dasar pengambilan keputusan hasil uji hipotesis adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikansi (Sig.) < dari probabilitas 0,05 maka ada pengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi politik.
- 2) Jika nilai signifikansi (Sig.) > dari probabilitas 0,05 maka tidak ada pengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi politik

Dalam pengujian hipotesis kali ini penelitian menggunakan uji t. Menurut Prayitno (2018) uji t digunakan untuk mengetahui suatu pengaruh pada variabel-variabel bebas (independent) secara individu atau parsial terhadap suatu variabel terikat (dependent). Adapun rumus t hitung pada analisis regresi adalah sebagai berikut:

$$t_{hitung} = \frac{b}{sb}$$

Keterangan:

b = Koefisien Regresi

sb = *Standard Error*

- 1) Dasar pengambilan keputusan hasil uji hipotesis adalah sebagai berikut: Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan $dk = n-2$ atau 67-2 dan $\alpha 0,05$ maka H_0 ditolak dan sebaliknya H_a diterima.
- 2) Apabila probabilitas (sig) < 0,05 maka H_0 diterima dan sebaliknya H_1 ditolak.

Menurut Sugiyono (2015) untuk menafsirkan hipotesis yang diperoleh digunakan pengkategorian atau klasifikasi sebagai berikut:

$0,00 - 0,199 =$ kategori sangat rendah

$0,20 - 0,399 =$ kategori rendah

$0,40 - 0,599 =$ kategori sedang

$0,60 - 0,799 =$ kategori kuat

$0,80 - 1,000 =$ kategori sangat kuat

V. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah penulis lakukan mengenai pengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi politik dalam pemilihan Kepala Desa Kampung Bakung Udik Kabupaten Tulang Bawang, dapat disimpulkan bahwasannya terdapat pengaruh kesadaran politik (Variabel X) terhadap partisipasi politik (Variabel Y), hal ini dapat dilihat dari hasil uji analisis regresi linier sederhana (X -Y) dengan hasil persentase sebesar 44,6% yang menunjukkan besarnya pengaruh kesadaran politik (variabel X) terhadap partisipasi politik (variabel Y) dan 55,4% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar kesadaran politik seperti keluarga, masyarakat, status sosial, dan tingkat pendidikan, dengan begitu dapat dikatakan bahwasanya kesadaran politik sangat memberikan pengaruh terhadap partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa Kampung Bakung Udik Kabupaten Tulang Bawang, dibuktikan dengan partisipasi politik masyarakat Kampung Bakung Udik sudah bagus, dimana hal tersebut dapat dilihat dari persentase cukup berpartisipasi dan berpartisipasi politik lebih banyak dari pada masyarakat yang kurang berpartisipasi politik.

5.2 Saran

1. Bagi Masyarakat agar selalu meningkatkan kesadaran politik serta ikut berpartisipasi dalam dunia politik agar hak-hak sebagai warga negara dapat tersalurkan.
2. Bagi Pemerintah terkait hendaknya lebih mengencangkan sosialisasi politik untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat.
3. Bagi Peneliti selanjutnya dapat menggunakan kerangka sampel, lokasi, ataupun kategori objek penelitian yang berbeda dari

penelitian ini sehingga dapat dilakukan riset yang lebih dalam mengenai pengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi politik. Penulis menyarankan menggunakan objek dengan kategori usia yang berbeda ataupun lokasi yang berbeda sehingga mendapatkan hasil riset yang lebih mendalam terkait kesadaran politik dan partisipasi politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, M. M. (2015). Pendidikan kewarganegaraan mengoptimalkan pemahaman perbedaan budaya warga masyarakat Indonesia dalam kajian manifestasi pluralisme di era globalisasi. *Jurnal ilmiah mimbar demokrasi*, 14(2), 1-10.
- Adha, M. M. (2019). Pengembangan keadaban kewarganegaraan melalui festival Krakatau (*Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia*).
- Adha, Muhammad Mona and Perdana, Dayu Rika and Supriyono, Supriyono (2021) Nilai Pluralistik: Eksistensi Jatidiri Bangsa Indonesia Dilandasi Aktualisasi Penguatan Identitas Nasional. *Jurnal Civic Hukum*, 6 (1). pp. 10-20. ISSN E-ISSN: 2623-0224.
- Adha, M.M., Rahayu, & A., Suntoro. (2014). Pengaruh Pemahaman Konsep Politik terhadap Tingkat Partisipasi Politik dalam Kehidupan Bernegara Masyarakat (Doctoral dissertation, Lampung University).
- Adha, M.M., Aditama, A., & Hasyim, A. (2013). Pengaruh Sikap dan Motivasi Masyarakat terhadap Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan Siskamling. (Doctoral dissertation, Lampung University).
- Adha, M.M., Lestari. S., & Suntoro. (2013). Pengaruh Pelaksanaan Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa terhadap Kesadaran Hak dan Kewajiban.
- Adha, M.M., Pitoewas. B. (2021). Signifikansi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Memaksimalkan Kompetensi Warga Negara. *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. 1(12), 437-446.
- Ahmed, Z., Javaid, M. A., Muzaffar, M., Fatima, N., Hussain, T., & Attock, S. (2015). *Comparing the level of political awareness among the students of*

social and natural sciences: A case study of public sector universities in Pakistan. Pakistan Journal of Life and Social Science, 13(2), 64-67.

Almond, G. A., Verba, S., & Simamora, S. (1990). *Budaya politik: tingkah laku politik dan demokrasi di lima negara.* Bumi Aksara.

Anggraini, O. M., & Zetra, A. (2015). Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dharmasraya Pada Pilkada 2015 Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dharmasraya Pada Pilkada 2015. 109–132.

Arifin, Anwar. (2011). *Komunikasi Politik: Filsafat-Paradigma-Teori-TujuanStrategi dan Komunikasi Indonesia.* Yogyakarta: Graha Ilmu

Arikunto, S. (2010). *Metode peneltian.* Jakarta: Rineka Cipta.

Averus, A., & Alfina, D. (2020). Partisipasi Politik. *MODERAT, 6, 585–610.*

Cholisin dan Nasiwan, (2012). *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Diryo Suparto, (2020). *Membangun Kesadaran dan Partisipasi Politik Masyarakat,* CV. Cendekia Press. Bandung

Ebrahimi, F. (2016). *Evaluation of the relationship between womens political awareness and their social participation in the contemporary society of Iran (Ardabil Province). International Journal of Asian Social Science, 6(4), 262-271.*

Fathoni, A. (2006). *Metodelogi Penelitian.* Jakarta: Rineka Cipta.

Fatwa, A. N. (2016). Pengaruh Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2013 Didesa Sesulu Kabupaten Penajam Paser Utara. *E-Journal Ilmu Pemerintahan, 4(4), 1615.*

Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23, Edisi 8.* In Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Goren, P. (2012). *Political values and political awareness. Critical Review*, 24(4), 505-525.
- Grange, K. (2013). *Shaping acting space: In search of a new political awareness among local authority planners. Planning Theory*, 12(3), 225-243.
- Gustina, dkk. 2019. Analisis Kesadaran Politik Masyarakat Desa Mariorilau Kecamatan Marioriwawo terhadap Tingkat Partisipasi dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Soppeng. *Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Universitas Negeri Makassar*.
- Halim, A. N., Suntoro, I., & Adha, M. M. (2014). Pengaruh iklan politik di televisi terhadap sikap pemilih pemula pada pemilihan umum (Doctoral dissertation, Lampung University).
- Handoyo, Eko.(2013). *Sosiologi Politik*. Yogyakarta: Ombak.
- Hasibuan, S.J. Kadir, A. & Nasution, M.H.T. (2018). Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018. *PERSPEKTIF*, 7 (1): 1-5.
- Husada, B. K., Usman, U. K., & Mulyana, A. (2018). Perencanaan Terrestrial Trunked Radio (tetra) Di Wilayah Bandara Internasional Husein Sastranegara. *eProceedings of Engineering*, 5(1).
- Husein Usman, (2018). *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta:Bumi Aksara.
- Janwandri (2013). Proses Pemilihan Kepala Desa Di Desa Tanjung Nanga Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau.eJournal IlmuPemerintahan , hal.238, 2013, 1 (1): 235-247 ISSN 0000-0000, ejournal.ip.fisip-unmul.org
- Janwandri. 2013. Proses pemilihan kepala desa. *eJurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 235–247.

- Jisokhi, F., Nasution, I., & Batubara, B. M. (2020). Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Orahili Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan Analysis of People ' s Participation in Orahili ' s Headman Election of Pulau- Pulau Subdistrict Nias Selatan ' s District. 2(1), 46–52.
- Jones C. 2015. *Slacktivism and the social benefits of social video: Sharing a video to 'help' a cause. First Monday.*
- Jubaedah, E., Affandi, I., & Anggraeni, L. (2022). Pengaruh Calon Artis Legislatif Terhadap Perilaku Pemilih Masyarakat Di Kota Bandung. *JURNAL Education And Development*, 10(2), 95-98.
- Kadir, A., (2013). Peranan Partai Politik dalam Menanggulangi Golongan Putih (Golput) pada Pemilihan Legislatif 2009, *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA* (Journal of Governance and Political UMA), 1 (1): 65-75
- Klašnja, M. (2017). *Uninformed voters and corrupt politicians. American Politics Research*, 45(2), 256-279.
- Leo, S. (2013). Kiat jitu menulis skripsi (Doctoral dissertation, Tesis, dan Disertasi. Jakarta: Erlangga).
- Lestari, S., Suntoro, I., & Adha, M. M. (2013). Pengaruh Pelaksanaan Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa terhadap Kesadaran Hak dan Kewajiban (Doctoral dissertation, Lampung University).
- Lubis, A, Nasution, M.A, & Kusmanto, H. (2019) Peran Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 (Studi pada Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang), *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA* (Journal of Governance and Political Social UMA), 7 (2): 199-204

- Manna, Z. H., & Syafiie, I. K. (2014). Strategi Pemerintah Daerah Poso Periode 2010-2015 dalam Menghadapi Konflik Sosial. *Journal of Governance and Public Policy*, 1(2).
- Margono, B. A., Turubanova, S., Zhuravleva, I., Potapov, P., Tyukavina, A., Baccini, A., & Hansen, M. C. (2012). Mapping and monitoring deforestation and forest degradation in Sumatra (Indonesia) using Landsat time series data sets from 1990 to 2010. *Environmental Research Letters*, 7(3), 034010.
- Muchtar, M., Hermana, D., Hanifah, H. S., & Anggraeni, W. A. (2023). Peran Media Komunikasi Pemerintahan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Pelayanan Publik (Studi Pada Kecamatan Tarogong Kaler Garut). *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 10(1), 179-188.
- Nasution, F. A., Thamrin, M. H., & Ritonga, A. D. (2020). Menakar Partisipasi Politik Masyarakat Kota Medan Terhadap Pemilihan Walikota Medan Tahun 2020. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 12(2), 97-113.
- Nasution, M. A. (2012). Peranan Parpol dalam Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan. *Jurnal poleteia*, 4.
- Nurbaiti, Laili. 2019. Kesadaran Politik dan Partisipasi Politik (Pengaruh Tingkat Kesadaran Politik terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Kelurahan Tajur pada Pilkada Kota Tangerang Tahun 2018). Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah : Jakarta.
- Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan kepala desa
- Prayitno, S. (2012). Pengaruh Karakteristik Keuangan Pemerintah Daerah dan Karakteristik Kepala Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).
- Romadloniyah, A. L., & Prayitno, D. H. (2018). Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Daya Guna, Persepsi Kepercayaan, Dan Persepsi

Manfaat Terhadap Minat Nasabah Dalam Menggunakan E-Money Pada Bank Bri Lamongan. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI)*, 3(2), 699-â.

- RR Emilia Yustiningrum dan Wawan Ichwanuddin, (2015) “Partisipasi Politik dan Perilaku Memilih pada Pemilu 2014”, *Jurnal Penelitian Politik* Vol 12, No 1
- Rudiadi dan Herawati. (2016). Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Perspektif Otonomi Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau).*Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*,hal. 140-141, Tahun 2017, Volume 13, Nomor 1
- Santoso, N. F. A. (2020). *Bentuk partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilu tahun 2019 di Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Malang).
- Sasikala, V., & Francisca, S. (2017). Empowering citizens: does gender difference prevails in the exercise of civic responsibility. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 7(1), 1-7.
- Soeprapto, A., Susilastuti, D. N., & Suparno, B. A. (2015). Komunikasi Dalam Proses Pendidikan Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum 2014 di DIY. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 12(1), 39-54.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Suherman, Israwandi. 2018. Hubungan Kesadaran Politik terhadap Sikap Politik pada Pemilih Pemula Mahasiswa. Skripsi. Universitas Brawijaya : Malang.
- Sujarweni, V. W., & Endrayanto, P. (2012). Statistika untuk penelitian. *Yogyakarta: Graha Ilmu*, 14, 17.
- Sulaksono, Prasetyo , Teki and., Kurniasih, Yuli and Adha, Muhammad Mona (2018) Kontribusi PKN dalam Pengembangan Perspektif Lintas

- Budaya Peserta Didik. *Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 2 (1). pp. 22-31. ISSN e-ISSN: 2580-0086
- Suparto, D., & Pamungkas, M. Z. W. (2023). Political Participation Of Beginning Voters In The Election Of Head Of Bangsri Village, Bulakamba Sub-District, Brebes District, In 2022. *Interdisciplinary Journal and Hummanity*, 2(2), 107-118.
- Surbakti, R. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sutanto Leo, Kiat Jitu (2013). *Menulis Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Jakarta: Erlangga.
- Syahrilla, I. Z., & Mujab, S. (2023). Analisis Kesadaran Dan Partisipasi Khalayak Politik Pada Kontestasi Pemilihan Ketua Lingkungan Rw 38 Villa Bekasi Indah II. *PODCAST: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(2), 1-9
- Takaendengan, B. J., Noor, R. R., Sumantri, C., & Adiani, S. (2011). Jarak genetik populasi kuda lokal sulawesi utara berdasarkan analisis morfologi dan polimorfisme protein darah. *Jurnal Ilmiah Sains*, 11(1), 48-57.
- Verba, S., Nie, N. H., & Kim, J. O. (1978). *Participation and political equality: A seven-nation comparison*. Cambridge University Press.
- Wibowo, A., & Wartini, S. (2012). Efisiensi modal kerja, likuiditas dan leverage terhadap profitabilitas pada perusahaan
- Yuliono, A. (2013). Kepercayaan Masyarakat Pada Partai Politik (Studi Kasus Kecenderungan Golongan Putih Pada Pemilihan Kepala Daerah di Wilayah Surabaya). *Jurnal Administrasi Publik (DIA)*, 11(1), 173-184.
- Zarkasi, A., & Rizal, D. (2023). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota Jambi Periode Tahun 2018-2023 Di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(3), 136–143.
- Zega, M.A. Muda, I. Batubara, B.M. & Suharyanto, A. (2018). Pengaruh Program Rumah Pintar Pemilu Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pada Kantor

Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, PERSPEKTIF, 7 (2): 60-65.